

# **Revisi Renstra Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 -2018**



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
2017

### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Revisi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, Dinas PKP dituntut untuk dapat menyelenggarakan tugas tersebut secara baik (*Good Governance*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk melakukan penyesuaian atas perubahan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Renstra ini adalah dokumen perencanaan yang memuat hal-hal yang berkaitan dan yang melatar-belakangi tugas pokok, fungsi dan substansi yang harus dilaksanakan, dengan melihat kepada visi, misi, kebijakan, sasaran, strategi, dan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini maupun dimasa mendatang.

Demikian Renstra ini disusun sebagai acuan perencanaan pembangunan urusan bidang Perumahan Provinsi Sumatera Utara. Kiranya Dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan bersama.

Medan, 27 Desember 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

  
Ir. IDA MARIANA, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19601125 199203 2 001

## DAFTAR ISI

|          |                                                                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BAB I    | PENDAHULUAN                                                                                        |          |
|          | 1.1 Latar Belakang .....                                                                           | I - 1    |
|          | 1.2 Landasan Hukum.....                                                                            | I - 5    |
|          | 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                         | I - 6    |
|          | 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                    | I - 6    |
| BAB II   | GAMBARAN PELAYANAN DINAS                                                                           |          |
|          | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                                                    | II - 1   |
|          | 2.2 Sumber Daya.....                                                                               | II - 28  |
|          | 2.3 Kinerja Pelayanan .....                                                                        | II - 32  |
|          | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....                                              | II - 46  |
| BAB III  | ISU-ISU STRATEGIS                                                                                  |          |
|          | 3.1 Identifikasi Permasalahan.....                                                                 | III - 1  |
|          | 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah .....                 | III - 3  |
|          | 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi<br>Sumatera Utara 2013-2033 .....          | III - 7  |
|          | 3.4 Telaahan Renstra Kementerian.....                                                              | III - 18 |
|          | 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis .....                                                            | III - 25 |
| BAB IV   | VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN                                                |          |
|          | 4.1 Visi dan Misi SKPD .....                                                                       | IV - 1   |
|          | 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....                                                        | IV - 2   |
|          | 4.3 Strategi dan Kebijakan .....                                                                   | IV - 4   |
| BAB V    | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,<br>KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..... | V - 1    |
| BAB VI   | INDIKATOR KINERJA                                                                                  |          |
|          | 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran<br>RPJMD .....                     | VI - 1   |
| BAB VII  | PENUTUP .....                                                                                      | VII-1    |
| LAMPIRAN |                                                                                                    |          |





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

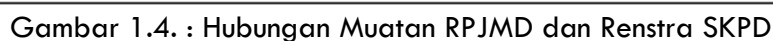
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen rencana pembangunan dinas untuk Tahun 2013 – 2018 yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Renstra disusun dengan mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sesuai Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota telah dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas PKP menyelenggarakan salah satu urusan pemerintahan yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itulah perlu disusun rencana strategis pembangunan untuk urusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melakukan revisi atas Renstra Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. SPM disusun oleh kementerian terkait masing – masing urusan wajib. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 1 tahun 2014 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22 Tahun 2008 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD.





## Hal I - 2

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan.
- h. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- i. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Tahapan Rencana Pembangunan Daerah
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- n. Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- p. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Tahun 2003 – 2018).
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
- v. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- w. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Provinsi Sumatera Utara beserta perubahannya.
- x. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah menyesuaikan Renstra Dinas Tarukim menjadi Renstra Dinas PKP sebagai implikasi dari perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah hasil pemetaan urusan pemerintahan tahun 2016. .

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara selama periode renstra.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan Revisi Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

## BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Revisi Rencana Strategis tahun 2013 – 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Pada bagian ini menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas.

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian ini identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra SKPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

## BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini akan menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, serta Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VI INDIKATOR KINERJA

Pada bagian ini akan menguraikan indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

## BAB VII PENUTUP



# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN**

### **1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dalam Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 mengamanatkan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 1 tahun 2014 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22 Tahun 2008 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Perkiman melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan PSU permukiman.

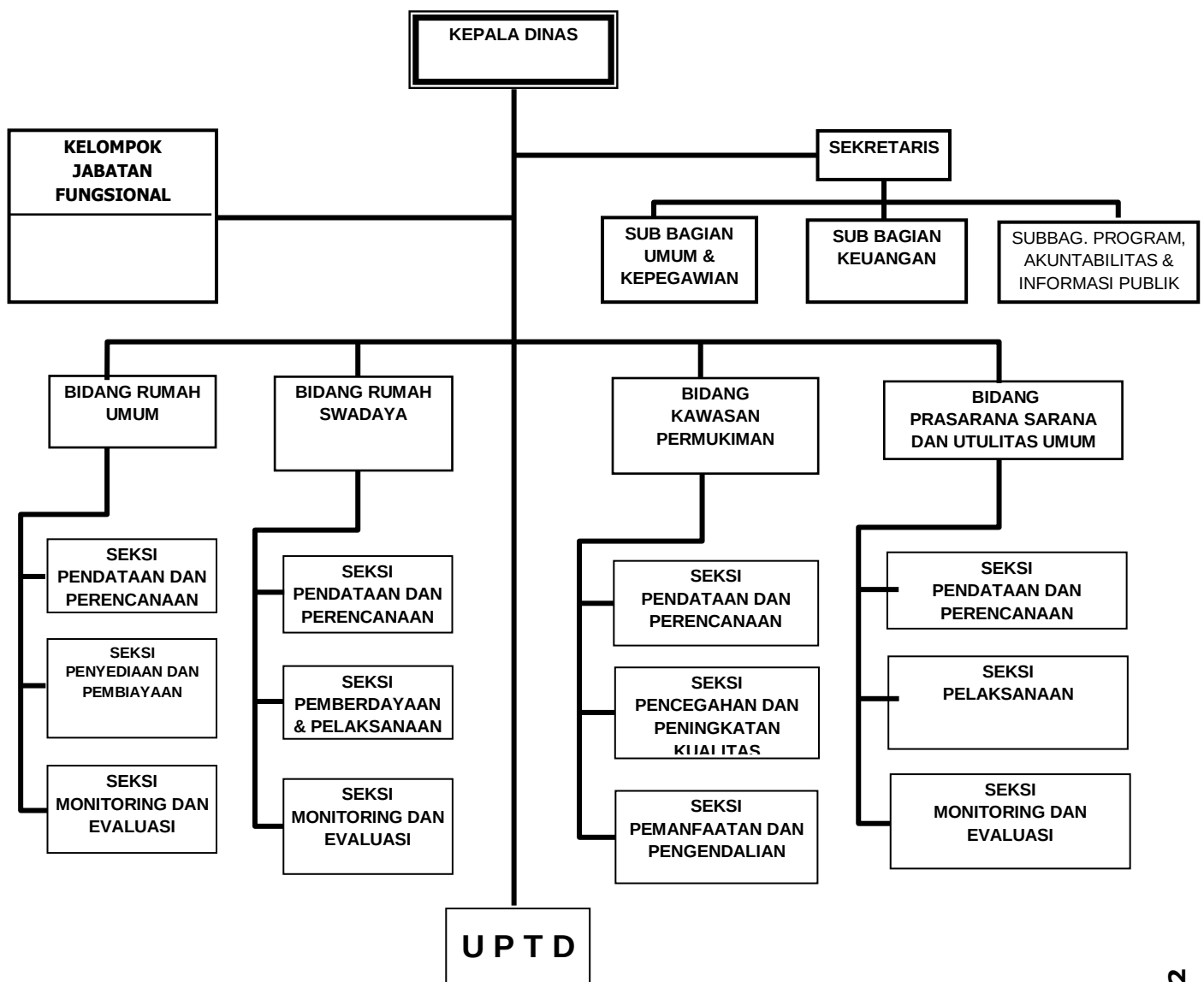
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- b. melaksanakan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- c. pelaksanaan evaluasi, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan



- registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- d. pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, setifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 1;



Gambar 1. Struktur Organisasi  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara



## 2. Sumber Daya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara didukung oleh SDM, sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 144 Orang yang terdiri atas;

- |                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| • Pejabat Struktural | 20  | Orang |
| • Pejabat Fungsional | 0   | Orang |
| • Staf Administrasi  | 124 | Orang |
| Jumlah               | 144 | Orang |

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan / fungsional / jabatan dan golongan, yaitu:

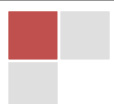
Menurut Strata Pendidikan;

- |        |   |     |       |
|--------|---|-----|-------|
| • S2   | : | 12  | Orang |
| • S1   | : | 81  | Orang |
| • D3   | : | 5   | Orang |
| • SLTA | : | 40  | Orang |
| • SLTP | : | 6   | Orang |
| Jumlah | : | 144 | Orang |

Munurut Fungsi/Jabatan Struktural;

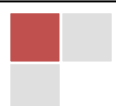
- |                 |   |    |       |
|-----------------|---|----|-------|
| • Kepala Dinas  | : | 1  | Orang |
| • Sekretaris    | : | 1  | Orang |
| • Kepala Bidang | : | 3  | Orang |
| • Kasi/Kasubbag | : | 15 | Orang |
| Jumlah          | : | 20 | Orang |

- |                                |   |                                     |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| • Kain Gorden (vertical Blind) | : | 2 set                               |
| • AC Split                     | : | 20 unit, terdiri dari 1 PK dan 2 PK |
| • Komputer                     | : | 25 unit                             |
| • Laptop                       | : | 2 unit                              |
| • Printer                      | : | 2 unit                              |
| • Lemari Kayu                  | : | 2 unit                              |
| • Kipas Angin                  | : | 5 unit                              |
| • Theodolit                    | : | 3 unit                              |
| • Auto Level                   | : | 10 unit                             |
| • CCTV                         | : | 1 set                               |
| • Sound sistem                 | : | 1set                                |

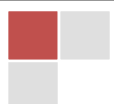


Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak memiliki aset tetap tanah, maupun bangunan kantor. Aset yang dikelola/dikuasai sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tercantum dalam tabel.1.

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan | Kecukupan Barang |        | Kondisi Barang |            |
|----|----------------------------|--------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
|    |                            |        |        | cukup            | Kurang | Baik           | Tidak Baik |
| 1  | Kendaraan Roda 4           | 8      | Unit   | -                | √      | 7              | 1          |
| 2  | Kendaraan Roda 2           | 11     | Unit   | -                | √      | 5              | 6          |
| 3  | Komputer                   | 21     | Unit   | -                | √      | 10             | 11         |
| 4  | Laptop                     | 15     | Unit   | -                | √      | 9              | 6          |
| 5  | Printer                    | 19     | Unit   | -                | √      | 19             | -          |
| 6  | Meja Biro                  | 6      | Buah   | -                | √      | 6              | -          |
| 7  | Meja 1/2 Biro              | 25     | Buah   | -                | √      | 20             | 5          |
| 8  | Meja Rapat                 | 10     | Buah   | -                | √      | 10             | -          |
| 9  | Meja Komputer              | 21     | Buah   | -                | √      | 21             | -          |
| 10 | Meja Kursi dan Tamu        | 2      | Set    | -                | √      | 2              | -          |
| 11 | Kursi Putar Besar          | 4      | Buah   | -                | √      | 4              | -          |
| 12 | Kursi Putar Kecil          | 20     | Buah   | -                | √      | 20             | -          |
| 13 | Kursi Kayu                 | -      | -      | -                | -      | -              | -          |
| 14 | Kursi Lipat                | -      | -      | -                | -      | -              | -          |
| 15 | Kursi Plastik              | -      | -      | -                | -      | -              | -          |
| 16 | Lemari 3 Pintu             | 1      | Buah   | -                | √      | 1              | -          |
| 17 | Lemari 2 Pintu             | -      | -      | -                | -      | -              | -          |
| 18 | Lemari Besi                | -      | -      | -                | -      | -              | -          |



| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan | Kecukupan Barang |        | Kondisi Barang |            |
|----|----------------------------|--------|--------|------------------|--------|----------------|------------|
|    |                            |        |        | cukup            | Kurang | Baik           | Tidak Baik |
| 19 | Filling Kabinet            | 10     | Unit   | -                | √      | 10             | -          |
| 20 | AC                         | 6      | Unit   | -                | √      | 6              | -          |
| 21 | Televisi                   | 6      | Unit   | -                | √      | 6              | -          |
| 22 | Mesin Penghancur Kertas    | -      | -      | -                | -      | -              | -          |
| 23 | Faxmile                    | -      | -      | -                | -      | -              | -          |
| 24 | Infokus/Proyektor          | 6      | Unit   | √                | -      | 6              | -          |
| 25 | Brankas                    | 6      | Unit   | √                | -      | 6              | -          |
| 26 | Soundsystem                | 2      | Set    | √                | -      | 2              | -          |
| 27 | Handycam                   | 2      | Unit   | √                | -      | 2              | -          |
| 28 | Kamera Digital             | 12     | Unit   | √                | -      | 12             | -          |
| 29 | Drone                      | 5      | Unit   | √                | -      | 5              | -          |
| 30 | Server                     | 2      | Unit   | √                | -      | 1              | 1          |
| 31 | Meteran Dorong             | 9      | Buah   | √                | -      | -              | -          |
| 32 | Concrete Hammer Test       | 4      | Buah   | -                | √      | 4              | -          |



## 2.3 Kinerja Pelayanan

Dalam Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 mengamanatkan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 1 tahun 2014 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 22 Tahun 2008 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota telah dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman sesuai dengan rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.1.





Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman  
Provinsi Sumatera Utara 2009 - 2013

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                                                                       | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- |     |     |     |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |             |        |             |                          | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                      |            |            |                          | 1                             | 2   | 3   | 4   | 5    | 1                           | 2           | 3      | 4           | 5                        | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1) | (2)                                                                                                                  | (3)        | (4)        | (5)                      | (6)                           | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)                        | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                     | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1  | Penyusunan rencana program                                                                                           |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 1 keg                       |             |        |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 2  | Sosialisasi Penataan Ruang                                                                                           |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 1 keg                       |             |        |             | 1 keg                    |                              |      |      |      |      |
| 3  | Penyusunan rencana pemanfaatan ruang kawasan                                                                         |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 5 Kab /Kota                 | 5 Kab /Kota |        |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 4  | Bantuan Teknis Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota                                                  |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 7 Kab /Kota                 | 2 Kab /Kota |        |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 5  | Pembinaan dan supervisi PPNS                                                                                         |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 1 keg                       |             | 1 keg  | 1 keg       |                          |                              |      |      |      |      |
| 6  | Pengembangan sistim informasi Penataan Ruang                                                                         |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 1 keg                       | 1 keg       |        |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 7  | Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Sumatera Utara                                                       |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |             | 1 Kws  | 1 Kws       |                          |                              |      |      |      |      |
| 8  | Penyusunan Road map kelembagaan pengembangan bersama kawasan strategis Danau Toba                                    |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |             | 1 keg  |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 9  | Bantuan teknis penyusunan RDTR dan zoning regulation kawaan perkotaan                                                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |             |        | 5 Kab /Kota | 8 Kab /Kota              |                              |      |      |      |      |
| 10 | Peningkatan jalan poros kawasan agropolitan                                                                          |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 2000 m                      | 8200 m      | 4100 m | 5900 m      | 4965 m                   |                              |      |      |      |      |
| 11 | Penyusunan Rencana Prasarana dan sarana Perkotaan                                                                    |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 2 pkt                       |             |        |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 12 | Pembinaan dan Sosialisasi sarana dan Prasarana perkotaan                                                             |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 2 pkt                       |             |        |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 13 | Penyusunan Rencana Prasarana dan sarana Perkotaan                                                                    |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             | 5 kab /kota |        |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 14 | Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perdesaan |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |             |        | 20 kab/kota | 25kecamatan/ 13 Kab/Kota |                              |      |      |      |      |



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                                                                              | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- |     |     |     |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |         |         |              |                          | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|---------|---------|--------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                             |            |            |                          | 1                             | 2   | 3   | 4   | 5    | 1                           | 2       | 3       | 4            | 5                        | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1) | (2)                                                                                                                         | (3)        | (4)        | (5)                      | (6)                           | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)                        | (12)    | (13)    | (14)         | (15)                     | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 15 | Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perkotaan        |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         | 9 kab/kota   | 16 kecamatan /8 Kab/Kota |                              |      |      |      |      |
| 16 | Penggantian Trestel di Pulau Berhala Kab. Serdang Bedagai                                                                   |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         |              | 1 keg                    |                              |      |      |      |      |
| 17 | Pembangunan rencana desain sistim air bersih kawasan perkotaan dan rawan bencana                                            |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         | 1 keg   |              |                          |                              |      |      |      |      |
| 18 | Pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana air bersih pada kawasan rawan air bersih                                     |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         | 13 kab /kota |                          |                              |      |      |      |      |
| 19 | Identifikasi daerah rawan air bersih di Provsu                                                                              |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         | 2 Keg        |                          |                              |      |      |      |      |
| 20 | Pembangunan Prasarana dan sarana air bersih                                                                                 |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         |              | 6 kab /kota              |                              |      |      |      |      |
| 21 | Penyusunan Studi RISPAM dan DED air minum kws Mebidang, dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air minum Kota Medan dsb |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         |              | 2 keg                    |                              |      |      |      |      |
| 22 | Peningkatan perpipaan/ sambungan rumah IPAL Ajibata-Prapat                                                                  |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         | 1 Keg   |              |                          |                              |      |      |      |      |
| 23 | Pilot project pembangunan sarana air limbah kawasan padat penduduk di Deli Serdang                                          |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         | 1 Keg   |              |                          |                              |      |      |      |      |
| 24 | Pendampingan proyek MSMHP                                                                                                   |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         | 1 Keg   | 1 Keg        | 1 Keg                    |                              |      |      |      |      |
| 25 | Pembebasan lahan untuk rumah pompa air limbah Kota Medan untuk pendampingan Proyek MSMHP                                    |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         |              | 1 Keg                    |                              |      |      |      |      |
| 26 | Studi AMDAL mendukung kegiatan MSMHP Kota Medan                                                                             |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         |              | 1 Keg                    |                              |      |      |      |      |
| 27 | identifikasi daerah rawan sanitasi                                                                                          |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         |              | 1 Keg                    |                              |      |      |      |      |
| 28 | kelembagaan TPA Regional Sibolga-Tapteng                                                                                    |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |         |         |              | 1 Keg                    |                              |      |      |      |      |
| 29 | Pembangunan saluran drainase Perdesaan                                                                                      |            |            |                          |                               |     |     |     |      | 3.100 m                     | 1.700 m | 6.390 m | 3.508,9 m    | 5.363 m                  |                              |      |      |      |      |
| 30 | Pembangunan saluran drainase Perkotaan                                                                                      |            |            |                          |                               |     |     |     |      | .500 m                      | .860 m  | .950 m  | 1.740 m      | .068 m                   |                              |      |      |      |      |



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                                                                                                                  | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- |     |     |     |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |       |             |                          | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|-------|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                 |            |            |                          | 1                             | 2   | 3   | 4   | 5    | 1                           | 2     | 3     | 4           | 5                        | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1) | (2)                                                                                                                                                             | (3)        | (4)        | (5)                      | (6)                           | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)                        | (12)  | (13)  | (14)        | (15)                     | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 31 | Pengawasan dan Pembinaan pembangunan saluran drainase                                                                                                           |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             | 2 Keg |       |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 32 | Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna                                                                                                                          |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             | 1 keg |       |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 33 | Lanjutan penataan kompleks Kantor PU di P. Sidempuan                                                                                                            |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             | 1 keg |       |             |                          |                              |      |      |      |      |
| 34 | Penyusunan RTBL kawasan perkotaan                                                                                                                               |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       | 2 Kws       |                          |                              |      |      |      |      |
| 35 | Pembangunan Gedung KNPI Sumatera Utara                                                                                                                          |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       |             | 1 keg                    |                              |      |      |      |      |
| 36 | Rehab. Hanggar Pesawat TNI AU Polonia Medan                                                                                                                     |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       |             | 1 keg                    |                              |      |      |      |      |
| 37 | Pembangunan Sopo Godang Mandailing Medan                                                                                                                        |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       |             | 1 keg                    |                              |      |      |      |      |
| 38 | Pembangunan Gedung Pendidikan Kader Ulama MUI                                                                                                                   |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       |             | 1 keg                    |                              |      |      |      |      |
| 39 | Studi kelayakan pembangunan Islamic Center                                                                                                                      |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       |             | 1 keg                    |                              |      |      |      |      |
| 40 | Penyusunan harga standart bangunan dan gedung negara (HSBGN)                                                                                                    |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       | 1 keg | 1 keg       | 1 keg                    |                              |      |      |      |      |
| 41 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah bangunan gedung di Provinsi Sumatera Utara. sesuai amat UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung                      |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       |             | 1 Keg                    |                              |      |      |      |      |
| 42 | Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perdesaan                                            |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       | 20 kab/kota | 25 kecamatan/13 Kab/Kota |                              |      |      |      |      |
| 43 | Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perkotaan                                            |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       | 9 kab/kota  | 16 kecamatan /8 Kab/Kota |                              |      |      |      |      |
| 44 | pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provsu                                                                                                   |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       | 1500 Unit   | 1400 Unit                |                              |      |      |      |      |
| 45 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perumahan /permukiman di Provinsi Sumatera Utara. sesuai amat UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |       |       |             | 1 Keg                    |                              |      |      |      |      |



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                                               | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- |     |     |     |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                              |            |            |                          | 1                             | 2   | 3   | 4   | 5    | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5     | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1) | (2)                                                                                          | (3)        | (4)        | (5)                      | (6)                           | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)                        | (12) | (13) | (14) | (15)  | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 46 | Bantuan teknis penyusunan berupa RP3KP, SPPIP dan pemutakhiran data perumahan dan permukiman |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      | 3 keg |                              |      |      |      |      |



### 2.3.1 Bidang Bidang Kawasan Permukiman

Pada kawasan permukiman kegiatan dilaksanakan untuk mengurangi luas kawasan kumuh dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan. Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Permukiman dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perdesaan
- Penataan Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan di perkotaan

Pembangunan Permukiman tidak lepas dari pengaturan tata ruang, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap Provinsi harus memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi setelah 2 (dua) tahun berlakunya Undang-undang ini akan tetapi RTRW Provinsi Sumatera Utara baru menjadi perda pada tahun 2017, hal ini terkendala karena belum adanya kesepakatan mengenai kawasan lindung. Pada tingkat Kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah RTRW sebanyak 20 (dua puluh) kabupaten/kota, 13 Kabupaten / kota yang lain memiliki kondisi tahapan penyusunan RTRW pada tahap yang beragam seperti pada tabel berikut :

| No | Kabupaten / Kota     | Status Penyusunan Perda RTRW                         |
|----|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Langkat              | Perda No. 09 Tahun 2013 tgl 16 Desember 2013         |
| 2  | Binjai               | Perda 13 Tahun 2011                                  |
| 3  | Medan                | Perda 13 Tahun 2011                                  |
| 4  | Deli Serdang         | Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD                     |
| 5  | Karo                 | Pengajuan pembahasan raperda oleh pemda ke DPRD      |
| 6  | Dairi                | Perda                                                |
| 7  | Pak-Pak Bharat       | Evaluasi raperda oleh pemerintah provinsi            |
| 8  | Sedang Bedagai       | Perda No. 12 Tahun 2013                              |
| 9  | Tebing Tinggi        | Perda 04 Tahun 2013                                  |
| 10 | Batu Bara            | Perda 10 Tahun 2013                                  |
| 11 | Asahan               | Perda 12 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013         |
| 12 | Tanjung Balai        | Perda 02 Tahun 2013                                  |
| 13 | Labuhan Batu Utara   | Perda                                                |
| 14 | Labuhan Batu         | Persetujuan bersama antar pemerintah daerah dgn DPRD |
| 15 | Labuhan Batu Selatan | Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD                     |
| 16 | Simalungun           | Perda No. 10 Tahun 2012                              |
| 17 | Pematang Siantar     | Perda 01 Tahun 2013                                  |



| No | Kabupaten / Kota   | Status Penyusunan Perda RTRW                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|
| 18 | Toba Samosir       | Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD                |
| 19 | Samosir            | Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD                |
| 20 | Humbang Hasundutan | Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD                |
| 21 | Tapanuli Utara     | Evaluasi raperda oleh pemerintah provinsi       |
| 22 | Tapanuli Tengah    | Perda                                           |
| 23 | Sibolga            | Evaluasi raperda oleh pemerintah provinsi       |
| 24 | Tapanuli Selatan   | Pengajuan pembahasan raperda oleh pemda ke DPRD |
| 25 | Padang Sidempuan   | Perda                                           |
| 26 | Mandailing Natal   | Pembahasan raperda rtrw dgn DPRD                |
| 27 | Padang Lawas       | Pengajuan pembahasan raperda oleh pemda ke DPRD |
| 28 | Padang Lawas Utara | Perda                                           |
| 29 | Gunung Sitoli      | Perda 12 Tahun 2012                             |
| 30 | Nias               | Perda                                           |
| 31 | Nias Utara         | Perda                                           |
| 32 | Nias Barat         | Perda                                           |
| 33 | Nias Selatan       | Perda                                           |

Untuk pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dari RTRW Provinsi, kabupaten / kota yang telah diperdakan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terkait dengan pengendalian, perencanaan dan rencana pemanfaatan tata ruang perlu adanya ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada saat ini untuk PPNS Provinsi Sumatera Utara yang telah mengikuti pendidikan PPNS Bidang Penataan Ruang berjumlah 5 orang. Sedangkan untuk kabupaten/kota belum seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki PPNS Bidang Penataan Ruang.

Sampai saat ini kegiatan masih bersifat pembinaan Sumber Daya Manusia di kabupaten/kota terkait dengan tugas pokok dan fungsi PPNS Penataan Ruang. serta bekerja sama dengan kepolisian daerah sumatera utara untuk menangani kasus yang terkait dengan penataan ruang.

Kinerja pelayanan SKPD dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Sosialisasi peraturan mengenai Penataan Ruang
- Bantuan teknis Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
- Bantuan teknis penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan
- Pembinaan dan supervisi PPNS Penataan Ruang
- Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Sumatera Utara





Indikator kawasan permukiman sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat nomor 2 tahun 2016 tentang penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berkaitan erat dengan prasarana dan sarana permukiman antara lain akses air minum layak, sanitasi, persampahan, akses pemadam kebakaran.

Untuk penyediaan Air Minum dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas.

Akses air bersih yang layak berasal dari air bersih sistem perpipaan dan air bersih non-perpipaan. Pada tahun 2013 akses air bersih di Sumatera Utara baru mencapai 60%.

**Tabel Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum  
Provinsi : Sumatera Utara  
Tahun Data : 2012**

| No. | Kabupaten/Kota           | Ledeng     | Sumur      | Sungai   | Hujan     | Kemasan    | Lainnya |
|-----|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|---------|
| 1   | Kota Medan               | 194,407.88 | 45,475.81  | 0.00     | 1,611.92  | 246,429.08 | 537.31  |
| 2   | Kota Binjai              | 3,664.09   | 29,450.75  | 28.19    | 0.00      | 24,365.90  | 0.00    |
| 3   | Kota Tebing Tinggi       | 4,351.15   | 18,137.43  | 0.00     | 0.00      | 12,743.41  | 0.00    |
| 4   | Kota Pematang Siantar    | 44,675.32  | 6,209.55   | 222.76   | 0.00      | 4,577.80   | 0.00    |
| 5   | Kota Tanjung Balai       | 21,920.77  | 449.14     | 1,334.02 | 462.55    | 9,351.52   | 0.00    |
| 6   | Kota Sibolga             | 13,341.17  | 3,060.76   | 0.00     | 49.66     | 1,942.41   | 0.00    |
| 7   | Kota Padang Sidempuan    | 9,145.60   | 27,842.21  | 0.00     | 0.00      | 6,608.55   | 0.00    |
| 8   | Kota Gunung Sitoli       | 3,608.15   | 17,436.36  | 614.88   | 520.68    | 3,966.61   | 0.00    |
| 9   | Kab. Deli Serdang        | 34,856.00  | 196,592.95 | 511.96   | 426.63    | 193,905.15 | 383.97  |
| 10  | Kab. Langkat             | 8,193.19   | 175,029.73 | 8,531.55 | 604.22    | 49,328.32  | 0.00    |
| 11  | Kab. Asahan              | 6,691.06   | 100,397.66 | 4,867.67 | 5,311.63  | 41,272.13  | 0.00    |
| 12  | Kab. Dairi               | 7,450.82   | 38,228.26  | 7,786.51 | 10,471.96 | 1,842.96   | 39.49   |
| 13  | Kab. Labuhan Batu        | 2,194.01   | 34,486.87  | 6,629.53 | 27,012.03 | 24,656.55  | 0.00    |
| 14  | Kab. Labuhanbatu Selatan | 53.48      | 53,719.05  | 4,064.36 | 0.00      | 9,011.11   | 0.00    |



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

|              |                         |                   |                     |                  |                  |                   |                  |
|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 15           | Kab. Labuhanbatu Utara  | 3,702.80          | 55,744.31           | 8,105.72         | 3,158.27         | 7,078.89          | 0.00             |
| 16           | Kab. Simalungun         | 36,969.90         | 160,499.85          | 3,775.47         | 1,887.73         | 8,738.73          | 212.11           |
| 17           | Kab. Tapanuli Utara     | 11,498.80         | 46,893.87           | 2,230.23         | 3,351.90         | 223.02            | 1,403.73         |
| 18           | Kab. Tapanuli Tengah    | 12,006.26         | 51,002.88           | 1,926.43         | 413.78           | 2,272.37          | 203.50           |
| 19           | Kab. Tapanuli Selatan   | 1,492.27          | 53,641.30           | 5,814.29         | 0.00             | 972.14            | 0.00             |
| 20           | Kab. Mandailing Natal   | 1,455.11          | 78,364.02           | 13,404.37        | 0.00             | 2,852.40          | 279.46           |
| 21           | Kab. Karo               | 26,663.09         | 67,867.05           | 0.00             | 0.00             | 1,840.50          | 0.00             |
| 22           | Kab. Nias               | 0.00              | 25,313.24           | 413.63           | 160.71           | 368.84            | 89.58            |
| 23           | Kab. Nias Selatan       | 1,380.54          | 51,892.56           | 2,583.94         | 4,801.36         | 415.38            | 0.00             |
| 24           | Kab. Nias Utara         | 498.73            | 20,877.54           | 2,384.87         | 2,618.31         | 124.68            | 21.22            |
| 25           | Kab. Nias Barat         | 0.00              | 12,374.84           | 589.82           | 3,266.97         | 117.96            | 34.41            |
| 26           | Kab. Humbang Hasundutan | 613.78            | 37,365.62           | 601.90           | 1,017.69         | 0.00              | 0.00             |
| 27           | Kab. Pakpak Barat       | 384.20            | 5,850.68            | 1,781.40         | 988.35           | 121.38            | 0.00             |
| 28           | Kab. Toba Samosir       | 4,685.33          | 31,822.28           | 1,160.55         | 0.00             | 4,089.96          | 1,384.89         |
| 29           | Kab. Serdang Berdagai   | 1,693.82          | 116,711.80          | 574.43           | 397.68           | 27,896.54         | 0.00             |
| 30           | Kab. Samosir            | 2,440.23          | 13,102.66           | 4,422.37         | 6,099.11         | 252.54            | 6,099.11         |
| 31           | Kab. Batu Bara          | 10,335.86         | 58,861.82           | 43.80            | 0.00             | 17,544.68         | 788.33           |
| 32           | Kab. Padang Lawas       | 52.87             | 48,324.81           | 2,553.43         | 0.00             | 1,929.61          | 0.00             |
| 33           | Kab. Padang Lawas Utara | 248.19            | 42,160.31           | 8,797.48         | 0.00             | 1,600.02          | 0.00             |
| <b>Total</b> |                         | <b>470,674.50</b> | <b>1,725,187.96</b> | <b>95,755.54</b> | <b>74,633.16</b> | <b>708,441.14</b> | <b>11,477.10</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Di Sumatera Utara saat ini terdapat 15 PDAM yang berada di 23 kabupaten/kota dengan kondisi saat ini hanya 33 % PDAM yang sehat, 67 % PDAM belum sehat. Pemerintah provinsi akan terus mengupayakan kegiatan fasilitasi untuk menyehatkan PDAM sehingga PDAM tersebut dapat memenuhi kebutuhan air minum di daerahnya serta meningkatkan jumlah pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah tabel PDAM dan cakupan pelayanannya :

| No | PDAM               | Lokasi Pelayanan         | Cakupan Pelayanan % | Tingkat Kehilangan Air (%) | Tarif Rp. / M3 | Jumlah Pelanggan (Unit SR) | Penduduk Terlayani (Jiwa) | Kinerja |
|----|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 1  | Tirtanadi Sumatera | 1. Kota Padang Sidempuan | 46,5                | 24,8                       | 2.110          | 391.450                    | 2.071.778                 | Sehat   |

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| No | PDAM             | Lokasi Pelayanan                                                                                                                                             | Cakupan Pelayanan % | Tingkat Kehilangan Air (%) | Tarif Rp. / M3 | Jumlah Pelanggan (Unit SR) | Penduduk Terlayani (Jiwa) | Kinerja      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
|    | Utara            | 2. Kab. Tapanuli Tengah<br>3. Kab. Tirtanadi<br>4. Kab. Karo<br>5. Kab. Toba Samosir<br>6. Kab. Samosir<br>7. Ka. Nias Selatan<br>8. Kab. Padang Lawas Utara |                     |                            |                |                            |                           |              |
| 2  | Tirta Wampu      | Kab. Langkat                                                                                                                                                 | 10,3                | 29,8                       | 1.632          | 13.885                     | 83.310                    | Sehat        |
| 3  | Tirta Uli        | Kota P.Siantar                                                                                                                                               | 86,4                | 31,4                       | 1.627          | 52.538                     | 216.100                   | Sehat        |
| 4  | Tirta Lihou      | Kab. Simalunun                                                                                                                                               | 13,3                | 45,6                       | 1.872          | 19.222                     | 115.333                   | Kurang Sehat |
| 5  | Tirta Deli       | Kab. Deli Serdang                                                                                                                                            | 2,4                 | 36,6                       | 1.502          | 3.887                      | 20.045                    | Kurang Sehat |
| 6  | Tirta Uumbu      | Kab. Nias                                                                                                                                                    | 2,7                 | 26,9                       | 935            | 2.712                      | 11.885                    | Sakit        |
| 7  | Tirta Malem      | Kab. Karo                                                                                                                                                    | 27,4                | 56,7                       | 1.532          | 16.002                     | 96.012                    | Sakit        |
| 8  | Tirta Bulian     | Kota Tebing Tinggi                                                                                                                                           | 52,6                | 27,8                       | 2.657          | 8.957                      | 74.234                    | Sehat        |
| 9  | Tirta Nciho      | Kab. Dairi                                                                                                                                                   | 21,1                | 49,5                       | 737            | 9.571                      | 57.426                    | Sakit        |
| 10 | Tirta Bina       | Kab. Labuhan Batu                                                                                                                                            | 4,2                 | 37,6                       | 3.210          | 7.205                      | 43.230                    | Kurang Sehat |
| 11 | Tirta Nauli      | Kota Sibolga                                                                                                                                                 | 59,6                | 48,2                       | 1.547          | 12.063                     | 66.918                    | Sehat        |
| 12 | Tirta Silaupiasa | Kab. Asahan                                                                                                                                                  | 16,9                | 35,3                       | 2.440          | 17.034                     | 115.686                   | Sakit        |
| 13 | Tirta Kualo      | Kota Tj. Balai                                                                                                                                               | 60,5                | 25,1                       | 1.175          | 16.953                     | 101.718                   | Kurang Sehat |
| 14 | Mual Natio       | Kab. Tapanuli Utara                                                                                                                                          | 13,1                | 45,5                       | 1.175          | 5.797                      | 34.782                    | Kurang Sehat |
| 15 | Tirta Sari       | Kota Binjai                                                                                                                                                  | 28,3                | 28                         | 3.464          | 11.106                     | 67.482                    | Sakit        |

Secara total target tingkat pelayanan air bersih saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air bersih PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kondisi penyediaan fasilitas air bersih bagi penduduk Sumatera Utara sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.1  
Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

| No | Jenis                        | Sumber Air Minum Penduduk Sumatera Utara (%) |       |       |       |       |
|----|------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                              | 2008                                         | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
| 1  | Air Kemasan                  | -                                            | 5,44  | 12,75 | 16,48 | 22,69 |
| 2  | Ledeng                       | 24,61                                        | 22,26 | 22,43 | 19,32 | 15,18 |
| 3  | Pompa                        | 18,39                                        | 18,62 | -     | 17,64 | 17,55 |
| 4  | Sumur                        | 37,19                                        | 35,58 | 37,08 | 28,08 | 25,93 |
| 5  | Mata Air                     | 12,53                                        | 11,74 | 11,42 | 12,51 | 12,79 |
| 6  | Lainnya (sungai, hujan, dll) | 7,28                                         | 6,36  | 16,32 | 5,96  | 5,85  |

Sumber : BPS Sumatera Utara, diolah

Untuk pelayanan air minum masyarakat, terdapat jumlah rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan sebesar 15,18%, hampir 85% dari penduduk Provinsi Sumatera Utara masih mengandalkan air sumur, air sungai, air hujan, dan air dalam kemasan sebagai sumber air minumannya.

Dokumen Perencanaan yang telah disusun adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) untuk kabupaten / kota. Diharapkan dokumen ini dapat dilegalisasikan dalam bentuk peraturan kepala daerah kabupaten / kota. Selain itu dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah provinsi juga telah menyusun RISPAM Regional Mebidang. Berikut adalah tabel kabupaten / kota yang telah menyusun RISPAM :

| NO | Kab / Kota              | Tahun Penyusunan | Keterangan                                           |
|----|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Kab. Asahan             | 2008             | Rencana Menyusun Ulang RI-SPAM T.A 2014              |
| 2  | Kab. Labuhan Batu Utara | 2010             | Sudah Terbit Perbup No 24 Tahun 2013                 |
| 3  | Kab. Padang Lawas Utara | 2010             | Proses Legalisasi                                    |
| 4  | Kab. Samosir            | 2011             | Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data            |
| 5  | Kab. Batu bara          | 2012             | Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data            |
| 6  | Kab. Deli Serdang       | 2012             | Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data            |
| 7  | Kab. Humbang Hasundutan | 2012             | Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data            |
| 8  | Kab. Simalungun         | 2012             | Perlu Penyempurnaan Laporan / Update Data            |
| 9  | Kab. Tapanuli Utara     | 2012             | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 10 | Kab. Toba Samosir       | 2012             | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 11 | Kota Medan              | 2012             | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| NO | Kab / Kota            | Tahun<br>Penyusunan | Keterangan                                           |
|----|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 12 | Kota Tanjung Balai    | 2012                | Penyempurnaan Dokumen / Update Data                  |
| 13 | Kab. Karo             | 2013                | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 14 | Kab. Labuhan Batu     | 2013                | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 15 | Kab. Langkat          | 2013                | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 16 | Kab. Mandailing Natal | 2013                | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 17 | Kab. Padang Lawas     | 2013                | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai  | 2013                | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 19 | Kab. Tapanuli Selatan | 2013                | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 20 | Kab. Tapanuli Tengah  | 2013                | Proses Legalisasi                                    |
| 21 | Kota Binjai           | 2013                | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |
| 22 | Kota Tebing Tinggi    | 2013                | Belum dievaluasi menurut kesesuaian Permen PU No. 18 |

Untuk pelaksanaan pembangunan Sub bidang Air Minum / Air Bersih di Sumatera Utara didukung oleh sumber dana APBD dan APBN, dengan pola pendanaan diatur untuk saling mendukung penyelenggaraan pembangunan air minum dalam satu sistem pelayanan.

Tabel pendanaan APBN pembangunan sub bidang air minum

| Tahun | Jumlah (Rp)     |
|-------|-----------------|
| 2009  | 41.083.605.000  |
| 2010  | 19.195.791.000  |
| 2011  | 72.921.522.000  |
| 2012  | 81.897.117.000  |
| 2013  | 135.676.487.000 |

Sumber : e-monitoring online kementerian PU

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Bersih dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Pembangunan rencana desain sistim air bersih kawasan perkotaan dan rawan bencana
- Pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana air bersih pada kawasan rawan air bersih
- Identifikasi daerah rawan air bersih di Provsu
- Pembangunan Prasarana dan sarana air bersih di kabupaten / kota



- Penyusunan Studi RISPAM dan DED air minum kws Mebidang, dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air minum Kota Medan dsk

Pada subbidang air limbah, BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat capaian sanitasi layak Sumatera Utara pada tahun 2012 adalah 60,72 %. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas baik sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan.

Untuk pelayanan penanganan limbah secara komunal skala kawasan / kota (off site) saat ini terdapat 21.000 KK yang memperoleh layanan yaitu :

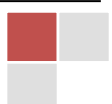
| NO | Kab/Kota        | Lokasi           | Jenis Kegiatan            | Jiwa Terlayanani |
|----|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 1  | Kab. Simalungun | Ajibata, Parapat | IPAL Off Site Ajibata     | 1.595            |
| 2  | Kota Medan      | Medan            | MMSHP ( Sawarage System ) | 79.665           |

Agar mendapatkan penanganan sanitasi secara tepat dan berkelanjutan maka perlu disusun dokumen perencanaan sanitasi. Strategi Sanitasi Kota (SSK) adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten, yang berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota didukung fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kabupaten / kota yan telah menyusun dokumen SSK adalah :

| No | Kabupaten / Kota        | Tahun Penyusunan SSK | Pendanaan        |
|----|-------------------------|----------------------|------------------|
| 1  | Kota Medan              | 2011                 | APBN Cipta Karya |
| 2  | Kota Binjai             | 2013                 | APBN Cipta Karya |
| 3  | Kota Tebing Tinggi      | 2011                 | APBN Cipta Karya |
| 4  | Kota Pematang Siantar   | 2013                 | APBN Cipta Karya |
| 5  | Kota Tanjung Balai      | 2012                 | APBN Cipta Karya |
| 6  | Kab. Asahan             |                      |                  |
| 7  | Kab. Deli Serdang       | 2011                 | APBN Cipta Karya |
| 8  | Kab. Humbang Hasundutan | 2013                 | APBN Cipta Karya |
| 9  | Kab.Karo                | 2012                 | APBN Cipta Karya |
| 10 | Kab.Toba Samosir        | 2011                 | APBN Cipta Karya |

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Peningkatan perpipaan/ sambungan rumah IPAL Ajibata-Prapat
- Pendampingan proyek MSMHP
- Pembebasan lahan untuk rumah pompa air limbah Kota Medan untuk pendampingan Proyek MSMHP
- Studi AMDAL mendukung kegiatan MSMHP Kota Medan
- Identifikasi daerah rawan sanitasi



Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah.. Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan pada pendekatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala rumah tangga, selanjutnya pada skala kawasan dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengelolaan sampah dengan melalui 3R dan TPST akan mengurangi timbunan sampah di TPA, dengan metoda ini di harapkan 20 % sampah dapat direduksi sebelum masuk ke TPA

UU NO 18 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa mulai tahun 2014 tak dibolehkan lagi mengoperasikan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah secara open dumping tetapi harus menggunakan sistim controlled landdfill, bagi kota kecil atau sedang dan sistim sanitary landfill bagi kota besar atau metropolitan. Perubahan sistem pengolahan persampahan ini memerlukan biaya yang sangat besar mulai dari penyediaan lahan, penyiapan prasarana dasar dan prasarana operasional serta sumber daya manusia. Penanganan persampahan di wilayah perkotaan diarahkan pada pembangunan TPA Regional yang akan digunakan oleh kabupaten dan kota dalam satu kawasan. Saat ini 90 % TPA di Sumatera Utara masing dikelola secara *Open Dumping*.

**TABEL TPA REGIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

| NO | CAKUPAN PELAYANAN TPA REGIONAL                            | LOKASI                     |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | KOTA MEDAN-KOTA BINJAI-KABUPATEN DELI SERDANG (I/A/1)     | KABUPATEN DELI SERDANG     |
| 2  | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI-KOTA TEBING TINGGI (I/A/1)      | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  |
| 3  | KABUPATEN TAPANULI TENGAH-KOTA SIBOLGA (I/A/1)            | KABUPATEN TAPANULI TENGAH  |
| 4  | KABUPATEN SIMALUNGUN-KOTA PEMATANGSIANTAR (II/A/1)        | KABUPATEN SIMALUNGUN       |
| 5  | KOTA TANJUNG BALAI-KABUPATEN ASAHAN (II/A/1)              | KABUPATEN ASAHAN           |
| 6  | KOTA PADANGSIDIMPUAN-KABUPATEN TAPANULI SELATAN (III/A/1) | KABUPATEN TAPANULI SELATAN |
| 7  | KEPULAUAN NIAS (IV/A/1)                                   | KOTA GUNUNGSITOLI          |

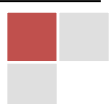
**Keterangan :**

I-IV : Tahapan Pengembangan

A : Pemantapan dan Pengembangan TPA Regional

A/1 : Pemantapan dan Revitalisasi TPA yang telah berfungsi

A/2 : Pengembangan TPA Regional yang baru





| No | Kabupaten / Kota     | Jenis TPA           | Nama TPA     |
|----|----------------------|---------------------|--------------|
| 1  | Medan                | Controlled Landfill | TPA Terjun   |
| 2  | Binjai               | Controlled Landfill | TPA Mencirim |
| 3  | Tebing Tinggi        | Open Dumping        |              |
| 4  | Pematang Siantar     | Open Dumping        |              |
| 5  | Tanjung Balai        | Open Dumping        |              |
| 6  | Padang Sidempuan     | Open Dumping        |              |
| 7  | Simalungun           | Open Dumping        |              |
| 8  | Labuhan Batu         | Open Dumping        |              |
| 9  | Toba Samosir         | Open Dumping        |              |
| 10 | Tapanuli Selatan     | Open Dumping        |              |
| 11 | Padang Lawas Utara   | Open Dumping        |              |
| 12 | Mandailing Natal     | Open Dumping        |              |
| 13 | Dairi                | Open Dumping        |              |
| 14 | Deli Serdang         | Controlled Landfill |              |
| 15 | Asahan               | Open Dumping        |              |
| 16 | Samosir              | Open Dumping        |              |
| 17 | Langkat              | Open Dumping        |              |
| 18 | Batu Bara            | Open Dumping        |              |
| 19 | Humbang Hasundutan   | Open Dumping        |              |
| 20 | Tapanuli Tengah      | Controlled Landfill | Aek Nabobar  |
| 21 | Sibolga              | Open Dumping        |              |
| 22 | Tapanuli Utara       | Open Dumping        |              |
| 23 | Karo                 | Open Dumping        |              |
| 24 | Nias Utara           | -                   |              |
| 25 | Nias Barat           | -                   |              |
| 26 | Padang Lawas         | Open Dumping        |              |
| 27 | Labuhan Batu Selatan | Open Dumping        |              |
| 28 | Labuhan Batu Utara   | Open Dumping        |              |
| 29 | Pakpak Bharat        | Open Dumping        |              |
| 30 | Nias                 | Open Dumping        |              |
| 31 | Nias Selatan         | Open Dumping        |              |
| 32 | Gunung Sitoli        | -                   |              |
| 33 | Serdang Bedagai      | Open Dumping        | Batang Terap |

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Persampahan dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan sebagai antara lain :

- Penyusunan kelembagaan TPA Regional Sibolga-Tapteng

Untuk periode Renstra 2009-2013 telah dibangun ± 250 Km Saluran drainase dalam upaya untuk mengurangi dampak genangan air di kawasan permukiman. Drainase yang telah dibangun menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota memeliharanya. Pembangunan saluran drainase ini diupayakan mengikuti masterplan drainase yang disusun pemerintah Kabupaten/kota, bagi kabupaten / kota yang belum menyusun masterplan sistem drainase perlu terus



dibina agar menyusun masterplan drainase sehingga pembangunan drainase dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Pembangunan drainase belum diikuti dengan data pengurangan kawasan genangan.

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Persampahan dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Pembangunan saluran drainase Perdesaan
- Pembangunan saluran drainase Perkotaan
- Pengawasan dan Pembinaan pembangunan saluran drainase

Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 tahun 2002. Hal yang paling mendesak saat ini adalah perlunya disusun Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/Kota tentang Bangunan Gedung. Saat ini telah difasilitasi 16 Kabupaten/kota dalam menyusun naskah akademis Perda Bangunan gedung. Namun respon Kabupaten /kota untuk segera membuat perda Bangunan Gedung sangat rendah. Hal ini akan menghambat kesempatan suatu daerah menerima bantuan pembangunan gedung dan lingkungan dari Pemerintah Pusat.

Kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

- Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna
- Lanjutan penataan kompleks Kantor PU di P. Sidempuan
- Penyusunan RTBL kawasan perkotaan
- Pembangunan Gedung KNPI Sumatera Utara
- Rehab. Hanggar Pesawat TNI AU Polonia Medan
- Pembangunan Sopo Godang Mandailing Medan
- Pembangunan Gedung Pendidikan Kader Ulama MUI
- Studi kelayakan pembangunan Islamic Center
- Penyusunan harga standart bangunan dan gedung negara (HSBGN)
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bangunan Gedung di Provinsi Sumatera Utara. sesuai amat UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

### 2.3.2 Bidang Perumahan

Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni masih menjadi permasalahan serius. Berdasarkan data BPS tahun 2012 masih terdapat 12,70 % keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Upaya mengatasi penurunan backlog (rumah layak huni) yang dimiliki oleh masyarakat antara lain melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, sehingga rumah dapat ditempati secara aman dan nyaman. Selama periode Renstra tahun 2009- 2013 telah dibangun 2.900 Rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan.

**Tabel SE-1. Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten**



**Provinsi : Sumatera Utara**  
**Tahun Data : 2012**

| No. | Kabupaten/Kota           | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga Miskin |
|-----|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1   | Kota Medan               | 488.462,00          | 47.034,19                  |
| 2   | Kota Binjai              | 57.521,00           | 4.024,79                   |
| 3   | Kota Tebing Tinggi       | 35.232,00           | 4.384,62                   |
| 4   | Kota Pematang Siantar    | 55.691,00           | 6.209,73                   |
| 5   | Kota Tanjung Balai       | 33.518,00           | 5.203,17                   |
| 6   | Kota Sibolga             | 18.394,00           | 2.424,28                   |
| 7   | Kota Padang Sidempuan    | 43.592,00           | 4.394,92                   |
| 8   | Kota Gunung Sitoli       | 26.165,00           | 8.404,92                   |
| 9   | Kab. Deli Serdang        | 426.634,00          | 21.759,43                  |
| 10  | Kab. Langkat             | 241.687,00          | 24.912,36                  |
| 11  | Kab. Asahan              | 158.556,00          | 17.202,58                  |
| 12  | Kab. Dairi               | 65.820,00           | 6.236,73                   |
| 13  | Kab. Labuhan Batu        | 94.979,00           | 9.637,67                   |
| 14  | Kab. Labuhanbatu Selatan | 66.848,00           | 9.932,66                   |
| 15  | Kab. Labuhanbatu Utara   | 77.790,00           | 9.155,42                   |
| 16  | Kab. Simalungun          | 212.105,00          | 21.647,74                  |
| 17  | Kab. Tapanuli Utara      | 65.595,00           | 7.797,53                   |
| 18  | Kab. Tapanuli Tengah     | 67.832,00           | 10.826,62                  |
| 19  | Kab. Tapanuli Selatan    | 61.920,00           | 7.058,14                   |
| 20  | Kab. Mandailing Natal    | 96.365,00           | 11.549,33                  |
| 21  | Kab. Karo                | 96.361,00           | 10.111,67                  |
| 22  | Kab. Nias                | 26.346,00           | 5.033,81                   |
| 23  | Kab. Nias Selatan        | 61.086,00           | 12.039,33                  |
| 24  | Kab. Nias Utara          | 26.528,00           | 8.074,43                   |
| 25  | Kab. Nias Barat          | 16.384,00           | 4.802,99                   |
| 26  | Kab. Humbang Hasundutan  | 39.599,00           | 3.995,53                   |
| 27  | Kab. Pakpak Barat        | 9.126,00            | 1.200,69                   |
| 28  | Kab. Toba Samosir        | 43.143,00           | 4.173,67                   |
| 29  | Kab. Serdang Berdagai    | 147.289,00          | 14.832,66                  |
| 30  | Kab. Samosir             | 29.365,00           | 4.600,77                   |



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

|       |                         |                     |                   |
|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 31    | Kab. Batu Bara          | 87.592,00           | 10.222,92         |
| 32    | Kab. Padang Lawas       | 52.866,00           | 5.580,06          |
| 33    | Kab. Padang Lawas Utara | 52.806,00           | 5.620,31          |
| Total |                         | <b>3.083.197,00</b> | <b>330.085,66</b> |

Keterangan :  
Sumber : BPS Sumatera Utara

Dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan, pemerintah provinsi kurang mendapat dukungan dari pemerintah/kabupaten kota. Hal ini tercermin dari sulitnya pemerintah provinsi memperoleh data kondisi rumah, Prasarana, sarana dan Utilitas permukiman di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumatra Utara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan gubernur nomor 25 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan standar pelayanan minimal pemerintah provinsi sumatera utara. Batas waktu pencapaian target Tahun 2009-2025.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk percepatan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. SPM Bidang Perumahan Rakyat merupakan salah satu bagian dari peraturan gubernur tersebut.

**Tabel. 2.1**  
Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang  
Perumahan Rakyat Tahun 2010-2012

| No  | Jenis Pelayanan Dasar<br>Skala Provinsi                                                  | Standar Pelayanan Minimal                                       |       | Batas Waktu<br>Pencapaian<br>(Tahun) | 2010   | 2011   | 2012   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                          | Indikator                                                       | Nilai |                                      |        |        |        |
| I.  | Rumah Layak Huni dan Terjangkau                                                          | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                           | 100%  | 2009 - 2025                          | 78,57% | 38,00% | 78,57% |
|     |                                                                                          | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau                | 70%   | 2009 - 2025                          | 37,44% | 38,00% | 39,00% |
| II. | Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 100%  | 2009 - 2025                          | -      | -      | -      |

Sumber : Biro otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu tahun 2012



Kinerja pelayanan Bidang perumahan dapat dijelaskan melalui bentuk – bentuk kegiatan antara lain :

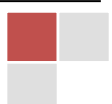
- pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provsu
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perumahan /permukiman di Provinsi Sumatera Utara. sesuai amat UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
- Bantuan teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pemutakhiran data perumahan dan permukiman

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dengan melihat kondisi dan kebijakan diluar kegiatan SKPD yang menjadi tantangan dan peluang ikut berperannya SKPD dapat dilihat sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas tarukim.

### **2.4.1 Tantangan**

- a. Masih adanya intervensi politis dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
- b. Belum adanya sertifikasi terhadap SDM profesional dan handal, sehingga daya saing cukup kompetitif di era perdagangan bebas.
- c. Terjadinya persaingan dalam berbagai disiplin ilmu sangat memungkinkan di era perdagangan bebas saat ini.
- d. Belum adanya kebijakan pembangunan yang telah disusun dan absah sebagai acuan serta mempunyai nilai konsistensinya yang tinggi
- e. Kondisi perekonomian dan keamanan Nasional masih belum stabil yang berdampak terhadap perubahan pelaksanaan pembangunan daerah yang telah disusun.
- f. Munculnya “raja-raja kecil daerah” sehingga mengakibatkan kesulitan untuk saling berkoordinasi pada dinas vertikal maupun horizontal di Kabupaten/Kota.



#### **2.4.2 Peluang**

- a. Membuka peluang bagi para investor untuk meng-invest dana dalam memacu pembangunan daerah (penataan ruang dan permukiman) melalui aksesibilitas yang data dan informasi yang tersedia (internet dan tradisional).
- b. Dibukanya era perdagangan Bebas (IMTGT, AFTA, AFEC, ACFTA dan GATT) akan meningkatkan daya saing dengan negara lain.
- c. Terbukanya peluang untuk mendapatkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan formal dan non formal baik dalam dan luar negeri.
- d. Adanya informasi sistem manajemen daerah yang merupakan sistem perencanaan terpadu berupa penyusunan konsep dan penerapan : Anggaran Berbasis Kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi kelembagaan, guna menciptakan good governance.
- e. Adanya kebijakan nasional MP3EI dan MP3KI



# BAB III

## ISU – ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2014-2018 meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan penataan ruang, pemenuhan prasarana dan sarana permukiman serta perumahan pada kurun waktu lima tahun mendatang. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Sumatera Utara

| Aspek Kajian                     | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi                                                                                          |                                                                                      | Permasalahan Pelayanan SKPD                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                          |                        | Internal / (Kewenangan SKPD)                                                                                      | Eksternal / (Diluar Kewenangan SKPD)                                                 |                                                                                                                               |
| (1)                              | (2)                      | (3)                    | (4)                                                                                                               | (5)                                                                                  | (6)                                                                                                                           |
| Ketersediaan PerdanRTRW Kab/Kota | 11 kab/kota              | 33 Kab/Kota            |                                                                                                                   | Hanya 20 Kabupaten/Kota yang telah mele                                              | Belum tersedianya dokumen RTRW sebagai panduan pembangunan infrastruktur pada kawasan sesuai dengan peruntukannya             |
| Akses air bersih yang layak      | 39,94 %                  | 71 %                   | Capaian tingkat pelayanan sesuai data BPS, Pemerintah Provinsi belum menetapkan cara penghitungan tingkat layanan | Pembangunan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah pusat dan swadaya masyarakat | Kewenangan penyediaan di pemerintah kab/kota, kewenangan pemerintah provinsi hanya pada kawasan regional antar kabupaten/kota |





**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| Aspek Kajian                                                          | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi                                                       |                                                                                                                      | Permasalahan Pelayanan SKPD                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                          |                        | Internal / (Kewenangan SKPD)                                                   | Eksternal / (Diluar Kewenangan SKPD)                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| (1)                                                                   | (2)                      | (3)                    | (4)                                                                            | (5)                                                                                                                  | (6)                                                                                                                                                                                |
| Layanan Air Limbah Terpusat di Kota Medan, Simalungun dan Kab. Tobasa | 3 %                      | 5 %                    | Pemerintah provinsi mendampingi proyek MSMHP                                   | Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya memfasilitasi pembangunan baru pembangunan untuk saluran Induk             | Sambungan Rumah untuk Air limbah merupakan kewenangan kabupaten/kota                                                                                                               |
| Infrastruktur TPA                                                     | 10 %                     | 90 %                   | Pemerintah provinsi mendorong pembangunan TPA Regional                         | Sulitnya pemerintah kabupaten / kota menyediakan Lahan dan Pembangunan TPA                                           | Perlu Segera merevitalisasi dan atau membangun TPA . Kewenangan penyediaan di pemerintah kab/kota, kewenangan pemerintah provinsi hanya pada kawasan regional antar kabupaten/kota |
| Pembangunan Drainase untuk mengurangi genangan                        | Belum diketahui          | 10 % / tahun           | Belum tersedia data titik dan luasan genangan                                  | Pemerintah kab/kota perlu menetapkan daerah dan luas rawan genangan                                                  | Kewenangan pada pemerintah kab / kota, Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi                                                                                                     |
| Perda Bangunan Gedung                                                 | 3 Kabupaten/ Kota        | 33 Kab/Kota            | Belum Optimalnya pembinaan                                                     | Merupakan salah satu syarat untuk mendapat alokasi pendanaan kegiatan dari Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya | Kewenangan pada pemerintah kab / kota, Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi                                                                                                     |
| Harga Standar Bangunan Gedung Tingkat Kab/Kota                        | 1 Buku                   | 33 Buku                | Pemerintah provinsi setiap tahun telah menyusun HSBGN                          | Kewajiban Pemerintah Kab/Kota menyusun sendiri HSBGN                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| Kawasan Kumuh                                                         | 1700 Ha                  | 0 Ha                   | Penangan kawasan kumuh belum pada daerah yang telah ditetapkan bupati/walikota | Semua kab/kota harus menetapkan kawasan kumuh dan luas area nya                                                      | Kewenangan pada pemerintah kab / kota, Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi                                                                                                     |
| Ketersediaan Rumah Layak                                              | 2.900 unit               |                        | Pemerintah provinsi telah melakukan                                            | Gencarnya kegiatan Bedah Rumah oleh Pemerintah Pusat                                                                 | Kewenangan pada pemerintah kab / kota, Pemerintah                                                                                                                                  |



| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi                     |                                      | Permasalahan Pelayanan SKPD                                                                     |
|--------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                          |                        | Internal / (Kewenangan SKPD)                 | Eksternal / (Diluar Kewenangan SKPD) |                                                                                                 |
| (1)          | (2)                      | (3)                    | (4)                                          | (5)                                  | (6)                                                                                             |
| Huni         |                          |                        | rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR | dan Pihak Swasta                     | provinsi hanya memfasilitasi, belum tersedianya data rumah layak huni di tingkat kabupaten/kota |

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tarukim Provsu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut. Visi Pembangunan Sumatera Utara :

#### **"MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA"**

Dinas Tarukim Provsu diharapkan dapat membangun sesuai Bidang tugas dan fungsinya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan sosial masyarakat.

Misi Pembangunan Sumatera Utara :

1. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance and clean government*).
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.



5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (Good Governance)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
2. **Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
3. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;



4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;
5. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Dari kelima misi Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut maka misi ketiga dan keempat adalah misi yang diemban Dinas Pentaan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional** dan **Meningkatkan kualitas Pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah** dengan cara menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Tabel 3.2  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| Visi: Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                        | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Permasalahan Pelayanan SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Faktor                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penghambat                                                                                                                                                                                                                  | Pendorong                                                                                                                                                                                       |
| (1)                                                                       | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                         | (5)                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                         | <p><u>Misi 3 :</u><br/>Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</li> <li>2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</li> <li>3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</li> </ol>                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya Perda RTRW di Kab/Kota</li> <li>2. Belum tersedianya dokumen rencana tata ruang di PKW</li> <li>3. Belum teridentifikasinya kondisi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Sumatera Utara</li> </ol>                                                                                                                                                                    | Masih banyaknya perencanaan kegiatan yang belum memperhatikan aspek tata ruang.                                                                                                                                             | Tersedianya aparatur penataan ruang                                                                                                                                                             |
| 2                                                                         | <p><u>Misi 4 :</u><br/>Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman</li> <li>2. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman</li> <li>3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan</li> <li>4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bangunan Gedung</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya tingkat pelayanan Air Minum dan Sanitasi / limbah</li> <li>2. Belum tersedianya dokumen perencanaan pembangunan skala lingkungan</li> <li>3. Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni</li> <li>4. Kurang terbinanya para pelaku pembangunan infrastruktur permukiman</li> <li>5. Semakin luasnya kawasan kumuh dan daerah genangan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum sinkronnya pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten / kota dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kewenangannya.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur permukiman</li> <li>2. Adanya dukungan pihak swasta melalui dana CSR</li> </ol> |



### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2013-2033**

#### **3.3.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah :  
"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdaya saing dan dan berwawasan lingkungan"

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara beserta strategi penataan ruang yang mendukung kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan daya dukung;
- b. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan poros timur dan barat.

#### **2. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
- b. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
- d. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan untuk meningkatkan daya saing;
- e. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan.
- f. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

#### **3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan luasan pertanian lahan basah yang ada saat ini;
- b. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah;



- c. Mencetak kawasan pertanian lahan basah baru untuk memenuhi swasembada pangan.
- d. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

**4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. mempertahankan luasan kawasan lindung;
- b. meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
- c. mengembalikan ekosistem kawasan lindung.

**5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman;
- b. mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

**6. Meningkatkan aksesibilitas dan pemeratakan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah Provinsi;
- b. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).

### **3.3.2 Rencana Struktur Ruang**

Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan maupun pertimbangan yang telah disampaikan di atas maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2033 terdiri dari 4 (empat) PKN, 9 (sembilan) PKW, 2 (dua) PKWp dan 39 (tiga puluh sembilan) PKL (**Tabel 3.1**).



**Tabel 3-1  
Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Utara**

| No  | Hierarki | Kota                                                          | Status Kota                     | Strategi          | Fungsi yang Diarahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PKN      | Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) | Eksisting dan Sedang berkembang | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pusat pemerintahan Provinsi</li> <li>– Pusat perdagangan dan jasa regional</li> <li>– Pusat distribusi dan kolektor barang &amp; jasa regional</li> <li>– Pusat pelayanan jasa pariwisata</li> <li>– Pusat transportasi darat, laut, dan udara regional</li> <li>– Pendidikan tinggi</li> <li>– Industri</li> </ul> |
| 2.  | PKW      | Tebingtinggi                                                  | Eksisting                       | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemerintahan Kota</li> <li>– Perdagangan dan jasa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  |          | Sidikalang, Kab. Dairi                                        | Sedang berkembang               | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>– Industri pengolahan hasil pertanian</li> <li>– Perdagangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| 4.  |          | Pematangsiantar                                               | Eksisting                       | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemerintahan Kota</li> <li>– Perdagangan dan jasa</li> <li>– Industri</li> <li>– Pendidikan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  |          | Balige, Kab. Toba Samosir                                     | Sedang berkembang               | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>– Perdagangan</li> <li>– Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil perikanan</li> <li>– Pelayanan jasa pariwisata</li> <li>– Pendidikan Tinggi</li> </ul>                                                                                                  |
| 6.  |          | Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu                              | Sedang berkembang               | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>– Perdagangan dan Jasa</li> <li>– Pengolahan hasil perkebunan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  |          | Kisaran, Kab. Asahan                                          | Sedang berkembang               | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>– Industri pengolah hasil perkebunan dan pertanian tanaman pangan</li> <li>– Perdagangan dan Jasa</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 8.  |          | Gunung Sitoli                                                 | Sedang berkembang               | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>– Pariwisata Bahari</li> <li>– Pengolahan hasil perikanan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  |          | Padangsidempuan                                               | Eksisting                       | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>– Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil hutan</li> <li>– Perdagangan dan Jasa</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| 10. |          | Sibolga                                                       | Eksisting                       | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemerintahan Kota</li> <li>– Pusat perdagangan dan jasa regional</li> <li>– Pusat pelayanan jasa pariwisata</li> <li>– Pengolahan hasil perikanan</li> <li>– Pusat transportasi laut</li> <li>– Pusat pendidikan</li> </ul>                                                                                         |
| 11. | PKL      | Pangkalan Brandan, Kab. Langkat                               |                                 | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengolahan hasil pertambangan</li> <li>– Pengolahan hasil pertanian</li> <li>– Perikanan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. |          | Stabat, Kab. Langkat                                          |                                 | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan</li> <li>– Industri Pengolahan hasil Pertanian</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. |          | Parbaungan, Kab. Serdang Bedagei                              |                                 | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Permukiman Perkotaan</li> <li>– Industri</li> <li>– Perdagangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. |          | Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagei                              |                                 | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Permukiman Perkotaan</li> <li>– Pusat Pemerintahan</li> <li>– Perdagangan dan Jasa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. |          | Limapuluh, Kab. Batubara                                      |                                 | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman perkotaan</li> <li>- Perdagangan dan Jasa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16. |          | Indrapura, Kab. Batubara                                      |                                 | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perikanan</li> <li>– Pelabuhan</li> <li>– Pengolahan hasil pertanian</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |





**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| No  | Hierarki | Kota                                   | Status Kota | Strategi          | Fungsi yang Diarahkan                                                                   |
|-----|----------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                                        |             |                   | – Pendidikan kejuruan                                                                   |
| 17. |          | Perdagangan, Kab. Simalungun           |             | Pengembangan baru | – Pengolahan Hasil Perkebunan<br>– Perdagangan                                          |
| 18. |          | Saribudolok, Kab. Simalungun           |             | Pengembangan baru | – Pertanian tanaman pangan<br>– Pendidikan kejuruan                                     |
| 19. |          | Pematang Raya, Kab. Simalungun         |             | Revitalisasi      | – Permukiman perkotaan<br>– Pendidikan                                                  |
| 20. |          | Parapat, Kab. Simalungun               |             | Revitalisasi      | – Pariwisata<br>– Perkebunan                                                            |
| 21. |          | Simpang Empat, Kab. Asahan             |             | Pengembangan baru | – Permukiman Perkotaan<br>– Pengolahan Hasil perikanan                                  |
| 22. |          | Aek Kanopan, Kab. Labuhan Batu Utara   |             | Revitalisasi      | – Pengolahan hasil perkebunan<br>– Pengolahan hasil pertanian                           |
| 23. |          | Labuhan Bilik, Kab. Labuhan Batu       |             | Revitalisasi      | – Industri Pengolahan hasil Perikanan<br>– Jasa                                         |
| 24. |          | Aek Nabara, Kab. Labuhan Batu          |             | Pengembangan baru | – Perkebunan<br>– pertanian tanaman pangan                                              |
| 25. |          | Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu Selatan |             | Revitalisasi      | – Pertanian tanaman pangan<br>– Perkebunan                                              |
| 26. |          | Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara    |             | Revitalisasi      | – Pertanian tanaman pangan<br>– Perkebunan                                              |
| 27. |          | Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan         |             | Revitalisasi      | – Pengolahan hasil perkebunan dan hutan<br>– Pendidikan kejuruan                        |
| 28. |          | Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan     |             | Pengembangan baru | – Pengolahan hasil perkebunan dan hutan<br>– Pendidikan kejuruan                        |
| 29. |          | Siabu, Kab. Mandailing Natal           |             | Pengembangan baru | – Pengolahan hasil pertanian<br>– Pendidikan kejuruan                                   |
| 30. |          | Kotanopan, Kab. Mandailing Natal       |             | Revitalisasi      | – Pengolahan hasil pertanian<br>– Pendidikan kejuruan                                   |
| 31. |          | Natal, Kab. Mandailing Natal           |             | Revitalisasi      | – Perikanan<br>– Pertanian tanaman pangan                                               |
| 32. |          | Panyabungan, Kab. Mandailing Natal     |             | Revitalisasi      | – Pengolahan Hasil Hutan dan perkebunan<br>– Pertanian tanaman pangan                   |
| 33. |          | Sibuhuan, Kab. Padang Lawas            |             | Pengembangan baru | – Perkebunan<br>– pertanian tanaman pangan                                              |
| 34. |          | Pandan, Kab. Tap. Tengah               |             | Pengembangan baru | – Permukiman perkotaan<br>– Perdagangan dan Jasa                                        |
| 35. |          | Barus, Kab. Tap. Tengah                |             | Pengembangan baru | – Perikanan tangkap<br>– Perkebunan<br>– Jasa                                           |
| 36. |          | Pangururan, Kab. Samosir               |             | Pengembangan baru | – Pariwisata<br>– Jasa<br>– Pengolahan Hasil pertanian                                  |
| 37. |          | Porsea, Kab. Toba Samosir              |             | Pengembangan baru | – pertanian tanaman pangan<br>– Pengolahan hasil hutan                                  |
| 38. |          | Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan |             | Revitalisasi      | – pertanian tanaman pangan<br>– Pengolahan hasil hutan<br>– Pengolahan Hasil perkebunan |



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| No  | Hierarki | Kota                                        | Status Kota | Strategi          | Fungsi yang Diarahkan                                                                                                                                   |
|-----|----------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. |          | Siborong-borong, <i>Kab. Tapanuli Utara</i> |             | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pertanian Tanaman Pangan</li> <li>– Pengolahan hasil perkebunan</li> </ul>                                     |
| 40. |          | Kabanjahe, <i>Kab. Karo</i>                 |             | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Agroindustri</li> <li>– Pengolahan hasil perkebunan</li> </ul>                                                 |
| 41. |          | Berastagi, <i>Kab. Karo</i>                 |             | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan</li> <li>– Pariwisata</li> <li>– Agroindustri</li> </ul>             |
| 42. |          | Merek, <i>Kab. Karo</i>                     |             | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pertanian tanaman pangan</li> <li>– Perkebunan</li> <li>– Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan</li> </ul> |
| 43. |          | Tiga Binanga, <i>Kab. Karo</i>              |             | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pertanian tanaman pangan</li> <li>– Perkebunan</li> </ul>                                                      |
| 44. |          | Kutabuluh, <i>Kab. Karo</i>                 |             | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pertanian tanaman pangan</li> <li>– Perkebunan</li> <li>– Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan</li> </ul> |
| 45. |          | Salak, <i>Kab. Pakpak Bharat</i>            |             | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pertanian tanaman pangan</li> <li>– Pendidikan kejuruan</li> </ul>                                             |
| 46. |          | Gido, <i>Kab. Nias</i>                      |             | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>– Pengolahan hasil perikanan</li> <li>– Perkebunan</li> </ul>            |
| 47. |          | Lotu, <i>Kab. Nias Utara</i>                |             | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perikanan</li> <li>– perkebunan</li> <li>– Peternakan</li> </ul>                                               |
| 48. |          | Teluk Dalam, <i>Kab. Nias Selatan</i>       |             | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perikanan tangkap</li> <li>– Pariwisata Bahari</li> </ul>                                                      |
| 49. |          | Lahomi, <i>Kab. Nias Barat</i>              |             | Pengembangan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perikanan tangkap</li> <li>– Perkebunan</li> </ul>                                                             |
| 50. | PKW p    | Tanjung Balai                               |             | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengolahan Hasil perikanan</li> <li>– Pelabuhan</li> <li>– Permukiman perkotaan</li> </ul>                     |
| 51. |          | Tarutung                                    |             | Revitalisasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– pertanian tanaman pangan</li> <li>– Pengolahan hasil hutan</li> <li>– Pengolahan Hasil perkebunan</li> </ul>   |

Sumber: Hasil Analisis, 2012

### 3.3.3 Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan arahan untuk pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya.

### 3.3.4 Rencana Kawasan Strategis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Untuk mendukung terciptanya struktur ruang



yang dikehendaki serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang akan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan analisis wilayah dan kebijakan yang berlaku maka selain kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRWN, terdapat kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan berdasarkan kepentingan:

- a. Pertumbuhan ekonomi;
- b. Sosial dan budaya;
- c. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut (**Tabel 3.2**):

**Tabel 3.2**  
**Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara**

| No. | Kawasan Strategis Nasional                                                                                                                                               | Kode Tahapan dan Tipe Pengembangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | Kawasan Perbatasan laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar 1 (Pulau Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara) | I/E/2                              |
| 2   | Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)                                                                                                            | I/A/1                              |
| 3   | Kawasan Danau Toba dsk, serta Kawasan Ekosistem Leuser                                                                                                                   | I/B/1                              |

Sumber: PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

\* Keterangan :

I-IV Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

A/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

B/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

C/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan SDA dan Teknologi Tinggi

D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

D/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

E/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;



- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;
  - 1. Merek, Kabupaten Karo;
  - 2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
  - 3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - 4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
  - 5. Harian, Kabupaten Samosir;
  - 6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
  - 7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
  - 8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
  - 9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi;
  - 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tanjungbalai – Asahan
  - 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun - Batubara
  - 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke
- c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi ;
  - 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuan Angin – Sibolga
  - 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mandailing Natal – Tapanuli Selatan
  - 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya
- e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- c. merupakan aset provinsi atau nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial dan budaya adalah sebagai berikut :



1. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, Meliputi:
  1. Situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang
  2. Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
  3. Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
2. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
3. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
4. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. rawan bencana alam; atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Ekosistem Bahorok;
2. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
3. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

Delineasi kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara merupakan deliniasi bersifat indikatif untuk menggambarkan posisi wilayah dalam peta. Batasan fisik kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara akan ditetapkan lebih lanjut melalui rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.3.**



**Tabel 3.3  
Karakteristik Nilai Strategis dan Issue Penanganan Kawasan Strategis**

| No  | Kawasan Strategis                                                                                | Kode Tahapan | Nilai/Aspek Strategis | Isu Penanganan                                                                                                                                                                                                   | Potensi/kendala                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K.1 | Kawasan Perkotaan Mebidangro                                                                     | I/A/2        | Ekonomi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sinergitas pembangunan antar daerah</li> <li>Sinergitas pelayanan umum</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daerah berkembang cepat perlu penanganan terencana dan terkordinasi</li> </ul>                                                                                                         |
|     |                                                                                                  | II/C/2       | Sosial Budaya         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Kawasan Cagar Budaya</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan salah satu identitas kebudayaan etnis di Sumatera Utara</li> </ul>                                                                                                           |
| K.2 | Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya                                                                | I/B/2        | Lingkungan Hidup      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan penataan lingkungan</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlunya koordinasi antara wilayah kabupaten yang berada pada DTA Danau Toba</li> </ul>                                                                                                |
|     |                                                                                                  | II/C/2       | Sosial Budaya         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kualitas Kawasan Cagar Budaya</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan salah satu identitas kebudayaan etnis di Sumatera Utara</li> </ul>                                                                                                           |
|     |                                                                                                  | I/A/2        | Ekonomi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesatuan konsep dan penanganan pengembangan pariwisata</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkembangnya kegiatan pariwisata tanpa konsep yang jelas</li> </ul>                                                                                                                   |
| K.3 | Kawasan Ekosistem Bohorok                                                                        | I/B/2        | Lingkungan Hidup      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga fungsi lindung kawasan konservasi</li> <li>Merupakan hulu DAS pada WS strategis ke beberapa kota utama</li> <li>Terdapatnya bencana longsor dan banjir</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya alih fungsi lahan yang sulit diawasi</li> </ul>                                                                                                                             |
| K.4 | Kawasan Lindung Tapanuli (Hutan Batang Toru) dan Mandailing Natal (Taman Nasional Batang Gadis); | I/B/2        | Lingkungan Hidup      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga keutuhan hutan lindung Batang Toru dan Taman Nasional Batang Gadis</li> <li>Merupakan hulu sungai-sungai besar ke kota utama</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan fungsi hutan Batang Toru menjadi hutan lindung</li> </ul>                                                                                                                 |
| K.5 | Kawasan Kepulauan Nias                                                                           | I/A/1        | Ekonomi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal</li> <li>Pengembangan pariwisata</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya desa-desa tertinggal yang perlu penanganan khusus</li> <li>Berkembangnya kegiatan pariwisata tanpa konsep yang jelas</li> <li>Terletak pada kawasan Rawan Bencana</li> </ul> |
|     |                                                                                                  | II/C/2       | Sosial Budaya         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kualitas Kawasan Cagar Budaya</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan salah satu identitas kebudayaan etnis di Sumatera Utara</li> </ul>                                                                                                           |
| K.6 | Kawasan Labuan Angin– Sibolga                                                                    | I/A/1        | Ekonomi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sinergitas pembangunan antar daerah</li> <li>Sinergitas pelayanan umum</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daerah berkembang cepat perlu penanganan terencana dan terkordinasi</li> </ul>                                                                                                         |
| K.7 | Kawasan Tanjung Balai - Asahan                                                                   | I/A/1        | Ekonomi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sinergitas pembangunan antar daerah</li> <li>Sinergitas pelayanan umum, khususnya pelabuhan laut</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daerah berkembang cepat perlu penanganan terencana dan terkordinasi karena memiliki kesamaan fasilitas pelayanan</li> </ul>                                                            |



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

| No  | Kawasan Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kode Tahapan | Nilai/Aspek Strategis | Isu Penanganan                                                                                                                                                                                      | Potensi/kendala                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K.8 | Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merek Karo;</li> <li>• Siborong borong, Tapanuli Utara;</li> <li>• Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan;</li> <li>• Lumban Julu Toba Samosir;</li> <li>• Harian, Samosir;</li> <li>• Silimakuta Simalungun;</li> <li>• Sitinjo, Dairi,</li> <li>• Siempat Rube Pakpak Bharat</li> </ul> | I/A/1        | Ekonomi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah berpotensi untuk dikembangkan dengan sinergitas antar daerah</li> <li>• Di beberapa segmen kawasan ada limitasi fisik untuk pengembangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan transportasi pelabuhan bandara yang mendukung</li> <li>• Terdapat potensi agro industry</li> </ul> |
| K.9 | Kawasan Kawasan Labuhan Batu dan sekitarnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I/A/1        | Ekonomi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah berpotensi untuk dikembangkan dengan sinergitas antar daerah</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah berkembang cepat perlu penanganan terencana dan terkordinasi</li> </ul>                                       |
|     | Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                           |
|     | Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                           |
|     | Kawasan Simalungun - Batubara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                           |
|     | Kawasan Sei Mangke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                           |

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Keterangan :

I-IV Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

A/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

B/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

C/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan SDA dan Teknologi Tinggi

D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

D/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

E/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan



### 3.4 Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 (dua) kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua Kementerian tersebut sebagai berikut:

#### 3.4.1 Telaahan Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014.

##### 3.4.1.1 Kondisi Pekerjaan Umum

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Sumatera Utara di antaranya adalah:

- a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
- b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
- c. Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- d. Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan Sumatera Utara sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.





- e. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- f. Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi saat ini juga mencatat belum seluruhnya tersusun perda tentang bangunan gedung di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- g. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan. Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- h. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR, akibat masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.
- i. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola pemerintahan yang baik), konteks meso (usaha dan pengusaha konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

#### **3.4.1.2 VISI Kementerian Pekerjaan Umum**

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

**“Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.**

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

#### **3.4.1.3 MISI Kementerian Pekerjaan Umum**

Misi untuk mencapai Visi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014, yaitu:



1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadi pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

#### **3.4.1.4 Tujuan**

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2010-2014 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan, pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

#### **3.4.1.5 Sasaran**

Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010 – 2017 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penertiban Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampungan air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi peningkatan kapasitas jalan wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
5. Mengingatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.



6. Meningkatnya kemampuan pemerintahan daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

### **3.4.2 Telaah Renstra pada Kementerian Perumahan rakyat**

Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010/2014.

#### **3.4.2.1. Kondisi Perumahan Rakyat**

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Perumahan di Sumatera Utara di antaranya adalah :

- a. Keterbatasan penyediaan rumah. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.
- b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
- c. Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
- d. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
- e. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatnya akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.
- f. Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan.
- g. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/memperbaiki rumah.



#### **3.4.2.2. Visi Kementerian perumahan rakyat**

Visi dari Kementerian Perumahan rakyat adalah :

#### **“Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”**

Visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani.

#### **3.4.2.3. Misi Kementerian perumahan Rakyat**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal.
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

#### **3.4.2.4. Tujuan**

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur.
4. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.
6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan.
7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber permbiyaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
8. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman.



9. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
10. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman.

#### **3.4.2.5. Sasaran Strategis**

Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

1. Terlaksana penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Terlaksana fasilitasi PSU Kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 700.000 unit.
3. Terlaksana penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa.
4. Terlaksana pembangunan rumah susun sederhana berupa Rusunawa sebanyak 36.480 unit.
5. Terlaksana pembangunan Rumah Khusus sebanyak 5.000 unit termasuk rumah sederhana sewa dan rumah pasca bencana.
6. Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa pembangunan baru sebanyak 50.000 unit.
7. Terlaksana fasilitasi pembangunan Rumah Swadaya berupa peningkatan kualitas sebanyak 50.000 unit.
8. Terlaksana fasilitasi penyediaan PSU Perumahan Swadaya berupa bantuan stimulant PSU Swadaya sebanyak 50.000 unit.
9. Terlaksana fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi lahan dan bangunan rumah bagi MBR sebanyak 30.000 unit.
10. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal.
11. Terlaksana penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 1.350.000 unit.
12. Meningkatnya mobilitasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman.
13. Terselenggara fungsi pelayanan bidang perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah (33 Provinsi).
14. Terlaksana DAK Perumahan dan Permukiman berupa fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 320.000 unit.
15. Terlaksana kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) bidang perumahan dan permukiman.



16. Terselenggara tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat secara efektif dan efisien.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi umum yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek ekonomi, sosial, kondisi prasarana dan sarana serta munculnya berbagai bencana alam yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman maka terdapat beberapa isu strategis antara lain sebagai berikut :

#### 1. Bidang Penataan Ruang, antara lain :

- a. Masih belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antara pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota.
- b. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan.
- c. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengharuskan semua Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara harus sudah memiliki rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Undang-undang ini.
- d. Masih rendahnya kinerja kelembagaan dan perangkat bidang penataan ruang.
- e. Belum tersedianya 30% ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di provinsi maupun di kabupaten/kota.
- f. Sesuai dengan rencana tata ruang, pusat-pusat pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara dikembangkan dengan mengembangkan sarana prasarana, fasilitas, dan infrastruktur pendukungnya. Kota baru maupun kota metropolitan dikembangkan dalam pusat-pusat pengembangan wilayah tersebut berupa pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), dan lainnya sesuai rencana struktur ruang wilayah
- g. Kawasan andalan dikembangkan di Provinsi Sumatera Utara agar wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat berkembang lebih efisien dengan fokus pengembangan pada produk unggulan wilayah sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN)

#### 2. Bidang Pekerjaan Umum, sub bidang (1) Perkotaan Perdesaan, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, (6) Kawasan Permukiman, (7) Bangunan Gedung dan Lingkungan dan (8) Jasa Konstruksi antara lain :



- a. Masih besarnya masyarakat yang belum dapat menikmati layanan air minum terutama pada masyarakat perdesaan dan kawasan rawan air bersih.
- b. Terbatasnya tempat pembuangan akhir sampah yang sesuai dengan standar lingkungan.
- c. Buruknya sistem sanitasi masyarakat terutama pada kawasan kumuh dan kawasan pesisir
- d. Belum tersedianya rencana induk sistem prasarana dan sarana kawasan perkotaan dan perdesaan.
- e. Masih kurangnya infrastruktur mendukung pada Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan dan kawasan pesisir pantai.
- f. Belum adanya peraturan daerah tentang bangunan gedung.
- g. Terbatasnya data dan informasi bangunan gedung.
- h. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan pengelolaan Bangunan Gedung.
- i. Masih rendahnya kinerja kelembagaan Bangunan Gedung.
- j. meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
- k. Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia mendukung Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012).
- l. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
- m. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.

### **3. Bidang Perumahan, antara lain :**

- a. Masih banyaknya masyarakat yang tinggal pada rumah tidak layak huni.
- b. Terbatasnya prasarana dan sarana dan utilitas perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Perlunya pengembangan kelembagaan pengelolaan urusan perumahan.





- d. Belum tersedianya NSPK bidang Perumahan tingkat provinsi sumatera utara.
- e. Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (*Global Warming*) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.



## **BAB IV**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 Visi dan Misi SKPD**

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah :

***"Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau"***

Penjelasan dari visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Tempat Tinggal, mengandung pengertian sebagai wujud bangunan sebagai hunian sekelompok orang yang didukung dengan lingkungan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan permukiman.
- b) Sehat, Layak dan Terjangkau, mengandung pengertian kualitas dari Tempat Tinggal dan Lingkungannya memenuhi standard kesehatan, keamanan, kehandalan dan kesuaian lahan dengan peruntukan tata ruang yang dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- a) Mewujudkan kualitas organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip *good governance*.
- b) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem, prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman dalam mendukung pengembangan wilayah.



- c) Mewujudkan kemudahan mendapatkan rumah dan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah penyelesaian permasalahan yang perlu dilakukann dalam mencapai visi, untuk melaksanakan misi, dengan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tabel IV. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

| NO. | TUJUAN                                                                                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                     | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |         |         |                     |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | 1                             | 2       | 3       | 4                   | 5                   |
| (1) | (2)                                                                                                                                          | (3)                                                                                                                                                                                                                      | (4)                                                                   | (5)                           | (6)     | (7)     | (8)                 | (9)                 |
| 1   | Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance | Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, serta penerapan prinsip good governance Pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumatera Utara | Meningkatnya Kinerja Organisasi dan SDM                               | 100 %                         | 100 %   | 100 %   | 100 %               | 100 %               |
| 2   | Membangun permukiman yang layak nuni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai                      | 1.Tersedianya Prasarana Dan Sarana Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Sumatera Utara<br>2.Tersedianya Prasarana Dan Sarana Pendukung Kawasan Perekonomian Di Sumatera Utara                                             | 1. Tertatanya kws kumuh perkotaan<br>2. Pembangunan PSU Perumahan MBR | 200 Ha                        | 200 Ha  | 200 Ha  | 200 Ha<br>3000 Unit | 200 Ha<br>2000 Unit |
| 3   | Menyediakan rumah yang layak huni, dan terjangkau bagi                                                                                       | 1.Terdianya dokumen data dan informasi perumahan dan permukiman di                                                                                                                                                       | 1. Tersusun dan dapat disosialisasikan NSPM                           | 8 kali                        | 10 kali | 10 kali | 10 kali             | 10 kali             |



| NO. | TUJUAN                     | SASARAN                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                    | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |           |           |          |           |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|     |                            |                                                                                                           |                                                                      | 1                             | 2         | 3         | 4        | 5         |
| (1) | (2)                        | (3)                                                                                                       | (4)                                                                  | (5)                           | (6)       | (7)       | (8)      | (9)       |
|     | seluruh lapisan masyarakat | provinsi Sumatera Utara.<br>2.Peningkatan Kualitas hunian dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah | bidang perkim<br>2. pilot proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni | 600 Unit                      | 1000 Unit | 1500 Unit | 350 Unit | 1500 Unit |

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Tarukim Provsu untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013-2018.

Strategi dan kebijakan yang ingin dicapai diuraikan pada **Tabel 4.1**.



Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

| <b>VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI I : Mewujudkan kualitas organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip <i>good governance</i>.</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                                | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Strategi</b>                                                                                                | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip <i>good governance</i>.</b>                                  | 1. Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, serta penerapan prinsip <i>good governance</i> Pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Prov. Sumatera Utara | 1. Peningkatan/Pengembangan sumberdaya dalam rangka mendapatkan kinerja aparatur dan pelayanan yang lebih baik | 1. Menyusun dan menyempurnakan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;<br>2. Menyelenggarakan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;<br>3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. |

| <b>VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI II : Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem, prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman dalam mendukung pengembangan wilayah</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Membangun permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai                                                                                                                                                  | 1. Tersedianya dokumen data dan informasi perumahan dan permukiman di provinsi Sumatera Utara.<br>2. Peningkatan Kualitas hunian dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.<br>3. Peningkatan kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan peran serta masyarakat. | 1. Melaksanakan Pembinaan Perumahan di Provinsi Sumatera Utara.<br>2. Melaksanakan Pengembangan Permukiman di Provinsi Sumatera Utara.<br>3. Melaksanakan Pembangunan Kawasan perumahan dan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.<br>4. Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman | 1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan pada tingkat provinsi;<br>2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;<br>3. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;<br>4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;<br>5. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, |



| <b>VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI II : Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem, prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman dalam mendukung pengembangan wilayah</b> |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                 | <b>Strategi</b>                                                                                                                                 | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;<br>6. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. |
| 1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman                                                                                                                                                                                                                    | 1. Tersedianya Prasarana Dan Sarana Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Sumatera Utara<br>2. Tersedianya Prasarana Dan Sarana Pendukung Kawasan Perekonomian Di Sumatera Utara | 1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman<br>2. Membangun prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan kawasan perekonomian | 1. Membangun dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;<br>2. Membangun PSU Perumahan MBR                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI V : Mewujudkan kemudahan mendapatkan rumah dan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                           | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Membangun permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai | 1. Tersedianya dokumen data dan informasi perumahan dan permukiman di provinsi Sumatera Utara.<br>2. Peningkatan Kualitas hunian dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.<br>3. Peningkatan kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan peran serta masyarakat. | 1. Melaksanakan Pembinaan Perumahan di Provinsi Sumatera Utara.<br>2. Melaksanakan Pengembangan Permukiman di Provinsi Sumatera Utara.<br>3. Melaksanakan Pembangunan Kawasan perumahan dan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.<br>4. Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam | 1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan pada tingkat provinsi;<br>2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;<br>3. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;<br>4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim; |



| <b>VISI : Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau</b>                                        |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI V : Mewujudkan kemudahan mendapatkan rumah dan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat</b> |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                    | <b>Sasaran</b> | <b>Strategi</b>                                      | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                | penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman | 5. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;<br>6. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan<br>7. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. |



# **BAB V**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan hasil analisis berbagai fakta dan informasi isu strategis hasil telaahan terhadap renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat dan RTRW Provinsi Sumatera Utara serta telaahan visi, misi dan program Gubernur Sumatera Utara periode 2014 – 2018 dan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2013/2018 nomor maka disusun Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sandingan Program pembangunan Gubernur Sumatera Utara sesuai bidang tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintah adalah :

| Bidang Urusan |                                                             | Program Kegiatan |                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 1                | Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman; |
|               |                                                             | 2                | Program Pembinaan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman                      |

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.





Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan maka dalam tahun 2013-2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan 2 (dua) Program prioritas pembangunan dan 5 (lima) program pendukung. Rencana program yang disusun adalah sebagai berikut :

**A. Program Pendukung**

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan Administrasi perkantoran

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan disiplin aparatur

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kinerja aparatur

**5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kinerja sistim pelaporan

**B. Program Prioritas Pembangunan**

**6. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman**

**Program ini bertujuan untuk :**

1. Tersedianya dokumen rencana dan NSPK pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman
2. Terbangunnya prasarana dan sarana infrastruktur lingkungan permukiman
3. Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan perekonomian

Program ini memuat **kegiatan-kegiatan pokok** sebagai berikut:

1. Fasilitasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman perkotaan (RP2KP) Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi pembangunan penataan lingkungan kawasan permukiman
3. Fasilitasi pembangunan jalan lingkungan permukiman pesisir, tradisional dan wisata
4. Fasilitasi pembangunan jalan poros pendukung perekonomian.



## **7. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman**

**Program ini** bertujuan untuk :

1. Tersedianya dokumen rencana dan NSPK pengembangan Perumahan
2. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi peraturan bidang perumahan dan permukiman
3. Peningkatan kualitas rumah hunian masyarakat berpenghasilan rendah
4. Peningkatan kapastitas kelembagaan pengelolaan perumahan dan permukiman

**Program ini** memuat **kegiatan-kegiatan pokok** sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota
2. Bantuan Stimulan untuk meningkatkan kualitas hunian
3. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan pengelola pembangunan perumahan
4. Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan
5. Penyusunan NSPK, sosialisasi, penyuluhan dan publikasi bidang perumahan dan permukiman
6. Studi Amdal Prasarana dan sarana kawasan perumahan dan permukiman
7. Pilot proyek hari keluarga nasional

Keseluruhan rencana program, kegiatan, indikator kinerja Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif masing – masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.



# **BAB VI**

## **INDIKATOR KINERJA**

### **6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur permukiman.

Prestasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2018.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan



komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2013 – 2018 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1



Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO  | Indikator                                |            | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|-----|------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------|
|     |                                          | Tahun 2013 | 2014                        | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |                                                |
| (1) | (2)                                      | (3)        | (4)                         | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)                                            |
| 1   | Luas kawasan kumuh (Ha)                  | 1.792      | 200                         | 200   | 200   | 200   | 200   | 792                                            |
| 2   | Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni | 2.900      | 600                         | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9.000                                          |



Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018

| No | SASARAN STRATEGIS                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                          | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2013 | TARGET TAHUNAN |       |       |      |       | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD | SUMBER DATA                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------|-------|------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                   |                                            |                                       | 2014           | 2015  | 2016  | 2017 | 2018  |                                         |                                                                                              |
| 1  | 2                                                                                                 | 3                                          | 4                                     | 5              | 6     | 7     | 8    | 9     | 10                                      | 11                                                                                           |
| 1  | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman | Luas kawasan kumuh (ha)                    | 1.792                                 | 200            | 200   | 200   | 200  | 200   | 792                                     | 1. Dokumen Renja<br>2. Dokumen Rensta<br>3. Dokumen RPJMD                                    |
|    |                                                                                                   | Pembangunan PSU Permukiman MBR (Unit)      |                                       |                |       |       | 3000 | 3000  | 6000                                    |                                                                                              |
| 2  | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman                     | Rehabilitasi rumah tidak layak huni (unit) | 2.900                                 | 600            | 1.000 | 1.500 | 350  | 1.500 | 8.450                                   | 1. Data hasil pembangunan / rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan Distarukim |



# **BAB VII**

# **PENUTUP**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 merupakan arahan penyelenggaraan pembangunan urusan wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan pembangunan, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara dapat diwujudkan.



# **LAMPIRAN I**

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF



TABEL 5.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      |                                                                                                                                                       |                                                                        |                                    |                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |         | (Rp. x 1.000.000)    |         |                                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| Tujuan                                                                                                                                       | Sasaran                                                                                                                                                    | Indikator sasaran                                                      | Kode | Program dan Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)              | Data Capaian pada awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                      |         | Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab | Lokasi |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      |                                                                                                                                                       |                                                                        |                                    | 2014                                          |        | 2015   |        | 2016   |        | 2017   |        | 2018   |         | Kondisi Akhir Rentra |         |                                   |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      |                                                                                                                                                       |                                                                        |                                    | Target                                        | Rp.    | Target | Rp.    | Target | Rp.    | Target | Rp.    | Target | Rp.     | Target               | Rp.     |                                   |        |
| (1)                                                                                                                                          | (2)                                                                                                                                                        | (3)                                                                    | (4)  | (5)                                                                                                                                                   | (6)                                                                    | (7)                                | (8)                                           | (9)    | (10)   | (11)   | (12)   | (13)   | (14)   | (15)   | (16)   | (17)    | (18)                 | (19)    | (20)                              | (21)   |
| Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance | Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, serta penerapan prinsip good governance | Meningkatnya Kinerja Organisasi dan SDM                                |      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                            | Meningkatnya pelayanan administratif perkantoran                       | 100 %                              | 100%                                          | 1,951  | 100%   | 2,000  | 100%   | 2,100  | 100%   | 2,100  | 100%   | 2,300   | 100 %                | 10,451  | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                                     | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                             | 100 %                              | 100%                                          | 4,088  | 100%   | 4,168  | 100%   | 4,288  | 100%   | 4,488  | 100 %  | 21,320  | Dinas PKP            | Sumut   |                                   |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                                                                 | Meningkatnya disiplin aparatur                                         | 100 %                              | 100%                                          | 198    | 100%   | 200    | 100%   | 200    | 100%   | 200    | 100 %  | 998     | Dinas PKP            | Sumut   |                                   |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                                                    | Meningkatnya kinerja aparatur                                          | 100 %                              | 100%                                          | 648    | 100%   | 700    | 100%   | 750    | 100%   | 900    | 100 %  | 3,748   | Dinas PKP            | Sumut   |                                   |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                        | Meningkatnya kinerja sistim pelaporan                                  | 100 %                              | 100%                                          | 216    | 100%   | 250    | 100%   | 300    | 100%   | 500    | 100 %  | 1,566   | Dinas PKP            | Sumut   |                                   |        |
| Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman                                                                                        | 1. Tersedianya Prasarana Dan Sarana Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Sumatera Utara                                                                     | 1. Tertatanya kws kumuh perkotaan<br>2. Pembangunan PSU Permukiman MBR |      | 2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN                                                                    | Luas kawasan kumuh (Ha), Bantuan Pembangunan PSU Permukiman MBR (Unit) |                                    | 1,592                                         | 39,594 | 1,392  | 35,550 | 1,192  | 65,000 | 1,292  | 61,500 | 1,092  | 145,500 | 1,092 Ha             | 347,144 |                                   |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Fasilitasi Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP)                                                         | Tersedianya dokumen RP2KP                                              | 9 Kab/Kota                         | -                                             | -      | 1      | 900    | 1      | 900    | -      | -      | -      | -       | 11 Kab/Kota          | 1,800   | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Pemetaan kws perumahan dan kws kumuh perkotaan di PKW Provinsi                                                                                        | Tersedianya data kws kumuh                                             | - Kws                              | -                                             | -      | 1      | 750    | 2      | 1,500  | -      | -      | -      | -       | 3 Kws                | 2,250   | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Fasilitasi penataan lingkungan permukiman pesisir, tradisional dan wisata                                                                             | Terbangunnya jalan lingk. permukiman pesisir, tradisional dan wisata   | - meter                            | 2                                             | 2,094  | 7,800  | 3,900  | 14,000 | 7,000  | -      | -      | -      | -       | 21,802 meter         | 12,994  | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Peningkatan jln poros kws Agropolitan pendukung kegiatan ekonomi perdesaan dan jalan poros kws strategis Nasional/provinsi dan desa pusat pertumbuhan | panjang jalan poros pendukung ekonomi pedesaan                         | 22.50 km                           | 4                                             | 19,000 | 7      | 7,900  | 10     | 10,000 | -      | -      | -      | -       | 43.5 km              | 36,900  | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Pembangunan jalan akses pendukung pertumbuhan kws PKW Provinsi dan kws strategis provinsi                                                             | Terbangunnya Jalan akses pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat      | - meter                            | 1,000                                         | 500    | 10,000 | 5,000  | 10,000 | 5,000  | -      | -      | -      | -       | 21,000 meter         | 10,500  | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Pembangunan jalan lingk. dan drainase pada kws kumuh perkotaan dan kws perdesaan di PKW Provinsi dan Strategis Provinsi serta desa pusat pertumbuhan  | Tertatanya kws kumuh perkotaan                                         | - ha                               | 15                                            | 18,000 | 10     | 14,500 | 15     | 35,000 | 20     | 36,000 | 200    | 120,000 | 260 ha               | 223,500 | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi di kawasan rawan sanitasi                                                                                       | meningkatkan kesehatan masyarakat                                      | - Kws                              | -                                             | -      | 8      | 2,600  | 8      | 5,600  | -      | -      | -      | -       | 48,000 Kws           | 8,200   | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Koordinasi dan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara                                                      | Tersedianya data kws kumuh                                             | - Lap                              | -                                             | -      | -      | -      | -      | -      | 1      | 350    | 1      | 350     | 2 Lap                | 700     | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara                                             | Data capaian pengurangan luas kawasan kumuh                            | - Lap                              | -                                             | -      | -      | -      | -      | -      | 1      | 350    | 1      | 350     | 2 Lap                | 700     | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara                                                                         | Tersedia data PSU Permukiman MBR                                       | - Lap                              | -                                             | -      | -      | -      | -      | -      | 1      | 350    | 1      | 350     | 2 Lap                | 700     | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Monitoring, evaluasi dan Pengawasan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara                                                                | Data capaian pembangunan PSU Permukiman MBR                            | - Lap                              | -                                             | -      | -      | -      | -      | -      | 1      | 350    | 1      | 350     | 2 Lap                | 700     | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Pembangunan PSU Permukiman MBR                                                                                                                        | Bantuan pembangunan PSU                                                | - Unit                             | -                                             | -      | -      | -      | -      | -      | 3,000  | 21,600 | 3,000  | 21,600  | 6,000 Unit           | 43,200  | Dinas PKP                         | Sumut  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                        |      | Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Bencana dan Pembangunan                                                                          | Tertatanya kws relokasi                                                | - Kws                              | -                                             | -      | -      | -      | -      | -      | 1      | 2,500  | 1      | 2,500   | 2 Kws                | 5,000   | Dinas PKP                         | Sumut  |

| (1)                                                                                                                     | (2)                                                                                          | (3)                                                                                                | (4) | (5)                                                                                                                                               | (6)                                                   | (7)        | (8)   | (9)    | (10)  | (11)   | (12)  | (13)    | (14)  | (15)   | (16)  | (17)    | (18)              | (19)          | (20)      | (21)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|-------------------|---------------|-----------|-------|
| Membangun permukiman yang layak nuni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai | 1. Terdianya dokumen data dan informasi perumahan dan permukiman di provinsi Sumatera Utara. | 1. Tersusun dan dapat disosialiasikan NSPM bidang perkim<br>2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni |     | <b>3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>                                                                             | <b>Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni</b>            | 1,792 ha   | 1,592 | 19,531 | 1,392 | 30,970 | 1,192 | 30,000  | 1,292 | 22,173 | 1,092 | 35,720  | 1,092 Ha          | 138,394       |           |       |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     | Penyusunan dan fasilitasi Dokumen RP3KP Provinsi dan Pemutahiran data perumahan                                                                   | Tersedianya NSPM Bidang Perumahan diProvsu            | 2 Dok.     | 2     | 802    | -     | -      | 1     | 750     | 2     | 1,223  | 6     | 3,470   | <b>11 Dok.</b>    | <b>6,245</b>  | Dinas PKP | Sumut |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     | Pengembangan basis data potensi pengembangan lahan perumahan dan kws permukiman di PKW Provinsi                                                   | Tersedianya data potensi lahan                        | - Dok.     | 1     | 450    | 1     | 450    | 1     | 450     | -     | -      | -     | -       | <b>3 Dok.</b>     | <b>1,350</b>  | Dinas PKP | Sumut |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     | Pengembangan Kelembagaan perumahan dan kws permukiman                                                                                             | Meningkatnya koordinasi pengembangan perumahan        | - Dok.     | 1     | 450    | 1     | 400    | 1     | 450     | -     | -      | -     | -       | <b>3 Dok.</b>     | <b>1,300</b>  | Dinas PKP | Sumut |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     | Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas hunian bagi MBR/Nelayan, RTLH dan HKN                                                                 | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni                   | 2,900 Unit | 600   | 13,600 | 1,000 | 23,000 | 1,500 | 24,350  | 500   | 14,000 | 1,500 | 25,000  | <b>8,000 Unit</b> | <b>99,950</b> | Dinas PKP | Sumut |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     | Pembinaan, perencanaan, koordinasi dan Pengawasan Pembangunan Bidang penataan Ruang dan Permukiman                                                | Meningkatnya kualitas pembangunan perumahan           | - kali     | 7     | 2,506  | 2     | 4,200  | 2     | 2,000   | 2     | 2,000  | 2     | 2,000   | <b>15 kali</b>    | <b>12,706</b> | Dinas PKP | Sumut |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     | Penyusunan NSPM, Sosialisasi, legalisasi, Publikasi, keikut serta pameran bidang penataan ruang dan permukiman                                    | Tersusun dan dapat disosialiasikan NSPM bidang perkim | - kali     | 8     | 1,223  | 10    | 1,420  | 10    | 2,000   | 10    | 2,000  | 10    | 2,300   | <b>48 kali</b>    | <b>8,943</b>  | Dinas PKP | Sumut |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     | Studi Amdal dan PS kws perumahan dan permukiman                                                                                                   | Tersusunnya dokumen Amdal pembangunan Perumahan       | - lokasi   | 1     | 500    | 1     | 1,500  | -     | -       | -     | -      | -     | -       | <b>2 lokasi</b>   | <b>2,000</b>  | Dinas PKP | Sumut |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     | Penyediaan Informasi Perumahan dan Kws. Permukiman (Penyediaan Rumah MBR, KPR, sistem Pembiayaan, Perbankan, Assosiasi Pengembang Perumahan, dll) | Tersedianya data potensi lahan                        | - Dok.     | -     | -      | -     | -      | -     | -       | 1     | 450    | 1     | 450     | <b>2 Dok.</b>     | <b>900</b>    | Dinas PKP | Sumut |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     | Penyusunan Profil Kawasan Kumuh di PKW Provinsi                                                                                                   | Meningkatnya kualitas pembangunan perumahan           | - Kws      | -     | -      | -     | -      | -     | -       | 5     | 2,500  | 5     | 2,500   | <b>10 Kws</b>     | <b>5,000</b>  | Dinas PKP | Sumut |
|                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                    |     |                                                                                                                                                   |                                                       | Jumlah     |       | 66,225 |       | 73,838 |       | 102,638 |       | 91,311 |       | 189,608 | -                 | 523,620       |           |       |